



For Officials

Edisi : 9 / Agustus 2024

Jawa Tengah

CAKRA NUSANTARA

Media Online & Cetak

 Cakra Nusantara TV  CN.net  Cakranusantara (Canus)  Cakranusantaraneet

DIRGAHAYU REPUBLIK
INDONESIA

70TH

Selamat
HARI JADI PATI
ke 701

Ratusan Karyawan PT Sejin di Pati Alami Keracunan
Wartawan dilarang Masuk Liputan - Hal :

PPDB SMAN 2 Pati Simpel Dibuat Ribet.
Ada Dugaan Pemalsuan Dokumen dan Jual Beli
Bangku Kelas - Hal :

Kapolres Pati Menerima Penghargaan Kompolnas
Award 2024 - Hal :

Penimbunan Solat Bersubsidi Diduga Milik Oknum
Sekdes - Hal :

Irijen Pol Ahmad Luthfi ; Sinergi Dengan Masyarakat
Wujudkan Pilkada Damai 2024 - Hal :

Memanas, Gapokta Desa Karang Sari Cluwak
Dengan KPPMK Hendak Duel - Hal :

Hadiri Rakor Renkon Banjir di BBD, Dandim Pati
Mengajak Memberikan Pengabdian Terbaik
Kepada Masyarakat - Hal :





Penyambutan Meriah Kapolda Jateng Yang Baru Ditengarai Tradisi Dan Penghormatan



Cakranusantara.net, Semarang | Polda Jateng menggelar acara Tradisi penyambutan Kapolda Jateng yang baru, Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo, dengan tradisi pedang pora yang berlangsung dari pintu gerbang hingga lobi Mapolda Jateng. Acara penyambutan ini dipimpin oleh Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho, dan dihadiri oleh jajaran PJU Polda Jateng serta anggota Bhayangkari, Jumat (02/08/2024)

Prosesi dimulai dengan laporan situasi Makopolda selanjutnya pengalungan bunga oleh Wakapolda kepada Kapolda Jateng Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo, diikuti penyerahan bucket bunga oleh Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Jawa Tengah kepada

Ketua Bhayangkari Daerah Jawa Tengah. Selanjutnya, Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo melewati gerbang Pedang pora, sebuah tradisi yang melambangkan penghormatan dan penghargaan tinggi.

Setelah prosesi Pedang pora, Kapolda Jateng berjalan menuju lobi, melewati jajar kehormatan diiringi oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) dengan cucuk lampah wayang Gatotkaca yang kekuatan dan keberanian.

Dalam sesi laporan kesatuan, Komjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan beberapa hal penting kepada Kapolda Jateng, beliau menekankan bahwa baik buruknya kesatuan ditentukan oleh sikap pribadi masing-masing anggota Polri di Jawa Tengah, menurutnya, semakin baik sikap perorangan anggota, maka semakin baik pula kesatuan Polda Jateng secara keseluruhan. Kapolda Jateng mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan dukungan yang diberikan oleh seluruh jajaran. Beliau juga menyatakan bahwa stabilitas kamtibmas selama kepemimpinan Komjen Pol Ahmad Luthfi senantiasa aman dan kondusif.

“Stabilitas kamtibmas di Jawa Tengah selama kepemimpinan beliau (Komjen Pol. Ahmad Luthfi) senantiasa aman dan kondusif, semua program yang sudah terlaksana dan yang baik akan diteruskan,” ungkapnya. Acara penyambutan ini menunjukkan komitmen Polda Jateng untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Jawa Tengah. **

Diterbitkan oleh : PT. MEDIA INDONESIA ARRAHMAN GROUP; SUSUNAN REDAKSI : PEMBINA : Letkol (Purn TNI) Ks. Sudarsono, S.H; Adv. Slamet Widodo, S.H; Suroto, S.H., M.H; PENASEHAT HUKUM : Adv. Karyanto, S.H., M.H; Adv. Fatkhur Rohman, S.H; PENASEHAT AGAMA : D. Nur Alim; Iman Syafi'i; PIMRED : AR. Syamsudin; REDAKTUR : DA. Ari Saptono; KOMISARIS : SARAN; R. Wijayanto; BENDAHARA : M Pujiani; HUMAS : Ali Anwar; ADMIN: Ali Mahmudi; WARTAWAN & INVESTIGASI : Kaperwil Jateng : Mashudi, Biro Banarnegara : dibutuhkan, Biro Banyumas : dibutuhkan, Biro Batang : dibutuhkan, Biro Blora : Mujahid, Biro Boyolali : dibutuhkan, Biro Brebes : dibutuhkan, Biro Cilacap : dibutuhkan, Biro Demak : Sumari, Biro Purwodadi : Muhaimin, Biro Jepara : Bambang, S, Biro Karanganyar : dibutuhkan, Biro Kebumen : dibutuhkan, Biro Kendal : dibutuhkan, Biro Klaten : dibutuhkan, Biro Kudus : Muslimin, Biro Magelang : dibutuhkan, Biro Pati : Abdul Rohman, Selamet Widodo, Suprayikno, Doni Sugiarto, Hanggoro Prasetyo Hadi Saputra, Tejo Susanto, Biro Pekalongan : dibutuhkan, Biro Pemalang : dibutuhkan, Biro Purbalingga : dibutuhkan, Biro Purworejo : dibutuhkan, Biro Rembang : D. Santoso, Biro Semarang : dibutuhkan, Biro Sragen : dibutuhkan, Biro Sukoharjo : dibutuhkan, Biro Tegal : dibutuhkan, Biro Temanggung : dibutuhkan, Biro Wonogiri : dibutuhkan, Biro Wonosobo : dibutuhkan, Biro Magelang : dibutuhkan, Biro Pekalongan : dibutuhkan, Biro Salatiga : dibutuhkan, Biro Surakarta : dibutuhkan, Biro Tegal : dibutuhkan, Kaperwil Jatim : Sumarno, Biro Bangkalan : dibutuhkan, Biro Banyuwangi : dibutuhkan, Biro Blitar : dibutuhkan, Biro Bojonegoro : dibutuhkan, Biro Bondowoso : dibutuhkan, Biro Gresik : dibutuhkan, Biro Jember : dibutuhkan, Biro Jombang : dibutuhkan, Biro Kediri : dibutuhkan, Biro Lamongan : dibutuhkan, Biro Lumajang : dibutuhkan, Biro Madiun : dibutuhkan, Biro Magetan : dibutuhkan, Biro Malang : dibutuhkan, Biro Mojokerto : dibutuhkan, Biro Nganjuk : dibutuhkan, Biro Ngawi : dibutuhkan, Biro Pacitan : dibutuhkan, Biro Pamekasan : dibutuhkan, Biro Pasuruan : dibutuhkan, Biro Ponorogo : dibutuhkan, Biro Probolinggo : dibutuhkan, Biro Sampang : dibutuhkan, Biro Sidoarjo : dibutuhkan, Biro Situbondo : dibutuhkan, Biro Sumenep : dibutuhkan, Biro Trenggalek : dibutuhkan, Biro Tuban : Konjin dibutuhkan, Biro Tulungagung : dibutuhkan, Biro Kediri : dibutuhkan, Biro Surabaya : dibutuhkan, Kaperwil Jabar : Mohari, Biro Bandung : dibutuhkan, Biro Bandung Barat : dibutuhkan, Biro Banjar : dibutuhkan, Biro Bekasi : dibutuhkan, Biro Bogor : dibutuhkan, Biro Ciamis : dibutuhkan, Biro Cianjur : dibutuhkan, Biro Cimahi : dibutuhkan, Biro Cirebon : dibutuhkan, Biro Garut : dibutuhkan, Biro Indramayu : dibutuhkan, Biro Karawang : dibutuhkan, Biro Kuningan : dibutuhkan, Biro Majalengka : dibutuhkan, Biro Pangandaran : dibutuhkan, Biro Purwakarta : dibutuhkan, Biro Subang : dibutuhkan, Biro Sukabumi : dibutuhkan, Biro Sumedang : dibutuhkan, Biro Tasikmalaya : dibutuhkan. Wartawan & Investigasi NKRI : Eko Riyadi, Mohamad Jimat

Alamat akses : Website : www.cakranusantara.net; Facebook : Cakranusantara; Fans Page : Cakra Nusantara; Babe : Cakranusantara; IG : Cakra Nusantara; YouTube : Cakra Nusantara TV; Snack : CN.net; E-mail : cakranusantaraneet@gmail.com; Call/ WA : 0812-8593-5774/ 0856-4139-6745/ 0895-8027-53555; Office : Jl. Kapten Ali Mahmudi No 548a, Puri, Pati, Jateng, Indonesia 59113; NOMOR REKENING DIREKTUR PT : BRI : 596301017917534; BCA : 098068907; NOMOR REKENING PT : PT MEDIA INDONESIA ARRAHMAN G BCA : 0980708136

PERHATIAN :

Semua Wartawan dan Investigasi yang tertera namanya dalam Box Redaksi dibekali KTA dan Surat Tugas. Bilamana menemukan mengaku sebagai Wartawan Cakra Nusantara, namun tidak bisa menunjukkan KTA dan/ atau Surat Tugas, mohon jangan dilayani. Jika diperlukan segera menghubungi pihak Redaksi. Diluar ketentuan itu, pihak Redaksi tidak bertanggung jawab. Untuk Wartawan di wilayah luar Jawa juga dibutuhkan bagi yang komitmen

Terimakasih atas Perhatiannya

Pengecut, DKK dan Disnakertrans Serta Pihak PT Sejin Pati Tak Berani Datang Audiensi Dengan BLN



Cakranusantara.net, Pati | Pengecut, pihak PT Sejin Pati tak berani datang saat diajak Audiensi oleh Barisan Lembaga Nusantara (BLN) bersama dengan anggota Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jum'at (2/8/2024).

Berdasarkan surat dari BLN tertanggal 26 Juli 2024 Nomor:08.A/BLN/AUDEN/VII/24, perihal audiensi dalam rangka mempertanyakan pertanggung jawaban pihak PT terhadap karyawan yang menjadi korban keracunan makanan pada beberapa waktu yang lalu. Ironisnya, pihak PT Sejin tak memiliki nyali saat diajak Audiensi oleh lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Bak seorang pengecut dalam mempertanggungjawabkan suatu masalah. Muhammad Chundori, salah satu aktivis yang hadir dalam kegiatan tersebut sangat disayangkan, Audiensi yang seharusnya dihadiri oleh pihak PT. Sejin, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pati tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah memang mereka alergi dengan fungsi sosial yang dijalankan oleh BLN selama ini?, apa mereka menghendaki agar Lembaga-Lembaga ini turun ke jalan untuk menyuarakan dan menuntut keterbukaan terkait peristiwa keracunan massal yang menimpa ratusan karyawan PT Sejin pada beberapa waktu yang lalu,” ungkapnya. Atau memang mereka menginginkan kami melakukan aksi demo seperti yang dilakukan oleh salah satu Ormas yang sempat Viral pada beberapa waktu yang lalu. Kalau memang Audiensi yang Kami lakukan tidak mendapatkan respon baik dari OPD dan PT Sejin maka bisa saja itu terjadi.

“Tidak menutup kemungkinan kami akan turun kejalan seperti apa yang dikehendaki oleh salah satu Karyawan yang tidak perlu disebutkan namanya (privasi-red). Supaya pihak Perusahaan lebih perhatian dan memperdulikan nasib ratusan Karyawannya,” tegas Chundori. “Kemudian, ia meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang, sambil menunggu proses yang masih berjalan. Karena uji laboratorium belum sepenuhnya selesai dan nanti DPR juga akan memanggil semua pihak terkait,” tutup Chundori. Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum konfirmasi ke pihak PT Sejin dan dinas terkait lainnya, guna mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai peristiwa yang telah menimpa ratusan karyawan tersebut. Rohman.

Dandim Pati Silaturahmi Sowan Kyai di Kajian Margoyoso



Cakranusantara.net, Pati – Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos didampingi Kepala Staf Kodim (Kasdim) Pati Mayor Cpl Ari Eko Prasetyo, S.T serta Danramil 06/Margoyoso Lettu Inf Wanto melaksanakan silaturahmi ke salah satu pondok pesantren di desa Kajian kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Kedatangan Dandim Pati disambut hangat oleh KH Abdul Ghoftar Rozin di kediamannya di komplek pondok

pesantren Maslakul Huda desa Kajian, Kamis (08/08/2024).

KH Abdul Ghoftar Rozin atau sering dikenal Gus Rozin merupakan salah satu ulama di Pati yang juga menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Tengah masa khidmah 2024 – 2029 adalah putra dari ulama kharismatik KH MA Sahal Mahfudh dan Nyai Hj Nafisah Sahal.

Kunjungan Dandim Pati di kediaman Gus Rozin ini merupakan kali kedua. Silaturahmi yang pertama bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin tanggal 27 Januari 2024 yang lalu. “Ini adalah kewajiban saya sebagai Dandim Pati untuk menjalin silaturahmi atau sowan kepada para Ulama, Kyai, para tokoh agama, tokoh masyarakat serta elemen masyarakat lainnya,” ujar Letkol Jon Saragi. “Ini adalah kunjungan yang kedua,” lanjut Dandim. “Kalau kunjungan yang pertama bertepatan pada saat kami

mendampingi bapak Wakil Presiden pada bulan Januari yang lalu,” ungkapnya. Menurut Dandim, menjalin silaturahmi dan membangun komunikasi yang baik dengan semua kalangan serta elemen masyarakat merupakan salah satu tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat teritorial. “Karena pada hakekatnya kami ini TNI yang berasal dari rakyat, dan suatu saat akan kembali ke masyarakat. Kewajiban kami bersatu dengan masyarakat untuk bisa menciptakan situasi yang kondusif, aman, damai di tengah-tengah masyarakat,” jelas Dandim. “Dandim sangat terkesan dengan adanya peran penting para Ulama (tokoh agama) dalam mewujudkan serta merawat kebhinekaan, menjaga persatuan untuk mencegah disintegrasi guna bersama-sama menjaga keutuhan serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas Dandim. Pendim

Carut Marut PPDB Sekolah Negeri, Dr Kurnia Zakaria : Kangkangi Pasal 94 UU Nomor 23 Tahun 2013



Cakranusantara.net, Jakarta | Carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran (TA) 2024/2025 ada dugaan ; (1) tidak transparannya Jalur Titipan lewat Program Indonesia Pintar (PIP) melalui dana aspirasi legislatif, (2) jual beli sertifikat Prestasi Akademik maupun olahraga Tingkat Provinsi/ Kota/ Kabupaten untuk mendongkrak nilai dalam seleksi jalur prestasi (PPDB-Prestasi), (3) Dinas Pendidikan Daerah belum satu paham tentang Regulasi aturan zonasi (PPDB-Zonasi), (4) SMP-MTs / SMA-SMK-MAN terbatas, banyak wali murid yang mengeluh kecurangan aturan zonasi (PPDB Zonasi).

Dalam temuan ORI ada kecurangan jual beli sertifikat prestasi olahraga melibatkan pengurus KONI daerah, dimana ada indikasi 900 murid memakai sertifikat “aspal prestasi olahraga” di Sumatera Selatan, sistem Afirmasi menggunakan jalur PIP dana aspirasi legislatif, dimana ada penyelewengan keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD Kota/ Kabupaten, Provinsi dan DPR RI) memanfaatkan kesempatan ini untuk kampanye terselubung, dimana merawat konstituen daerah pemilihan.

Kemudian perbedaan penafsiran panitia PPDB sekolah negeri menerapkan Zonasi, dimana ukuran Jarak punya penafsiran berbeda, ada yang memakai jarak meter dan memakai satu wilayah regional tertentu. Padahal sistem PPDB dipakai sejak tahun 2017, bukan semakin sempurna tetapi bagaimana bisa bermain “curang”, karena “Sekolah Negeri Favorit ada tidak”. Tetap saja masih berlaku. Dampak lain, Sekolah Negeri Pinggiran nungu jatah sisa. Sekolah swasta kurang bagus malah banyak tutup karena tidak kebanyakan murid baru. Seharusnya, anak sejak dini harus diajarkan Jujur dan berani bersaing “Fair play”. Di Semarang terjadi beberapa SMAN terpaksa menganulir murid barunya yang lolos PPDB Prestasi karena ketahuan memanfaatkan sertifikat palsu (Piagam Juara Marching Band) tingkat Individu dirubah menjadi Juara Marching Band SMPN 1 Semarang.

SMAN 1 Kedungwaru, Tulungagung diduga terjadi kecurangan dalam penerimaan PPDB. 51 Lulusan SMPN 19 Depok dianulir masuk 8 sekolah SMAN di Depok karena ketahuan me “mark-up” rapor disebut cuci rapor. Belum lagi kebijakan SMAN 6 Denpasar melakukan pemungutan pengadaan AC untuk tiap siswa baru sebesar 1,5 juta rupiah, yang akhirnya dibatalkan setelah viral. Dalam penerimaan Mahasiswa Baru (Maba) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lebih banyak menyediakan kuota untuk seleksi jalur mandiri, karena PTN dapat memanfaatkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi bagi yang diterima daripada Maba lewat jalur Seleksi Nasional Masuk PTN lewat jalur berbasis prestasi (SNBP) maupun SNBT (Tes) atau UTBK, dimana ada “komersialisasi BHMN PTN” dan dugaan jual beli kursi PTN terutama untuk jalur program studi favorit. Meski selalu disempurnakan proses PPDB masih saja menjadi masalah tiap tahun ajaran baru, KPK telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPK No.7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB. Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2023 bahwa 43 % Guru sekolah menyatakan ada siswa didik baru tidak memenuhi syarat di terima di

sekolah. 25 % Murid Baru menyatakan sendiri bahwa, supaya diterima disekolahan yang bersangkutan memberi imbalan tertentu terhadap pihak terkait dengan sekolah.

KPK sendiri tahun 2023 mengumumkan hasil SPI KPK ternyata ada 44,87 % sekolah ada dugaan penerimaan Pungutan Liar (Pungli). Sedangkan tingkat PTN seluruh Indonesia terjadi 57,14% ada dugaan pungli. Praktek Nepotisme murid titipan PPDB terjadi 38,77 % sekolah diseluruh Indonesia dan Mahasiswa titipan SNBP/ SNBT-UTBK/ Mandiri terjadi 64,02 % PTN seluruh Indonesia. Para calon murid/ mahasiswa baru tersebut merupakan titipan anak pejabat daerah maupun pusat, legislatif, aparat penegak hukum (APH), anak pengusaha, serta kalangan ASN Kemendikbud Ristek.

Kemudian, dari Komisi Ombudsman Pusat maupun Daerah Tahun 2024 menerima dugaan kecurangan pengumuman PPDB sebanyak 22 %, pelanggaran petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebanyak 16 %. Kecurangan prosedur sebanyak 14 %, dan kesalahan berkas persyaratan yang dibiarkan sebanyak 8 %. Dimana Mendikbud Ristek RI telah mengeluarkan Panduan Permendikbud Ristek No.1 Tahun 2021 dan Keputusan Sekjen Kemendikbud Ristek No.47 Tahun 2023 tentang pelaksanaan PPDB. Berdasarkan aduan masyarakat dugaan maladministrasi didominasi oleh penyimpangan prosedur sebanyak 51 %, tidak memberikan layanan yang diminta sebanyak 13 %, tidak kompeten sebanyak 12 %, diskriminasi sebanyak 11 %, penundaan berlarut sebanyak 7 %, permintaan imbalan uang, barang, dan jasa sebanyak 2 %, perlakuan tidak patut sebanyak 2 %, dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 2 %. Dalam proses PPDB jumlah pengaduan pada jalur prestasi sebanyak 141 laporan, jalur zonasi sebanyak 130 laporan, afirmasi sebanyak 47 laporan, dan Perpindahan Tugas Orangtua (PTO) sebanyak 11 laporan.

Hal itu diungkapkan Dr. Kurnia Zakaria, masih lanjutnya, ia mengamati jalur Zonasi masih banyak kekeliruan dalam memahami Juklak dan Juknis dalam penentuan Zona masih banyak sekolah memahami dengan menentukan patokan jarak antara sekolah dengan rumah calon murid baru, padahal bisa memakai kewilayahan. Tentang Afirmasi banyak disalahgunakan untuk pejabat daerah, padahal untuk ASN/ TKK/ Honorer pegawai Pemda/ BUMD tentang jalur disabilitas hanya sedikit sekali, sekolah membuka jalur disabilitas karena keterbatasan sarana dan prasarana sekolah dan SDM guru.

Sedangkan jalur Prestasi banyak diduga sekolah “cuci rapor” atau mengganti nilai demi prestasi sekolah. Juga sekolah penerima tidak transparan dalam pengumuman skor nilai penilaian PPDB jalur prestasi. Dari sertifikat akademik palsu, titipan hingga ada penambahan rombongan kelas belajar (rombel) tanpa ijin Kepala Dinas dan Kepala Daerah setempat. Biasanya dalam PPDB, pada umumnya terjadi “jual-beli bangku” dan “titipan/ nepotisme”, ada 10 Provinsi bermasalah dalam PPDB antara lain DI Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.

Pelanggaran PPDB ini, menurut Kurnia ada kesalahan prosedur, manipulasi dokumen, diskriminasi calon peserta didik, penambahan rombongan kelas belajar ilegal, kurangnya sosialisasi dan penambahan jalur seleksi masuk madrasah (MIN, MTsN, MAN) tanpa prosedur (DI Aceh), aplikasi eror dan tanpa pengawasan Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah setempat (Jawa Barat), penerbitan akta notaris perwalian anak pejabat (DI Yogyakarta), pengaduan orangtua calon peserta didik tidak ditanggapi (Banten), penerimaan PPDB di luar prosedur seperti kuota UTBK 40 % dan PPDB reguler 60 % (PPDB Cerdas, Magelang, Jawa Tengah). Tujuan Pemerintah memakai sistem PPDB memang baik demi keteradilan calon anak didik diterima di sekolah negeri dan mencegah ketimpangan prestasi akademik siswa antar sekolah negeri yang favorit dan prestise dengan sekolah negeri yang miskin prestasi dan rendah nilai lulusannya.

PPDB harus transparan, obyektif dan akuntabel, apalagi kemampuan pemerintah membangun sekolah negeri baru walaupun banyak sekolah negeri ditutup, karena tidak ada peminat dan berubah fungsi sekolah. LSM Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia memantau dan menerima pengaduan PPDB tahun 2024 ada 162 kasus, dimana permasalahan jalur prestasi (42 %), manipulasi kartu keluarga jalur zonasi (21 %), mutasi orang tua peserta didik (7 %), Jalur Afirmasi (1 %).

Kurnia melihat orang tua calon peserta didik baru banyak melakukan pemalsuan dokumen alamat untuk diterima di sekolah yang diinginkan seperti :

1. Orangtua peserta didik menghubungi jasa edit dokumen untuk mengubah alamat di Kartu Keluarga dengan Lokasi yang lebih dekat,
2. Jasa edit dokumen bisa ditemui di media sosial Facebook, Instagram, X, Tiktok, dengan postingan akun penawaran jasa pembuatan kartu keluarga, ijazah, akte lahir, KTP, SIM, STNK.
3. Bila orang tua berminat diminta mengirim salinan dokumen via Japri Whatsapp maupun email,
4. Kemudian jasa edit akan mengubah alamat di dokumen sesuai permintaan konsumen,
5. Konsumen membayar biaya edit dan hasilnya dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp,
6. File dokumen hasil editan diunggah ke situs PPDB jalur zonasi. Contoh kasus seorang siswa memakai cara ini agar anaknya masuk ke SMA 5 Kota Bengkulu, dimana menggunakan data KK orang lain yang diedit dimana ES sesuai data aslinya berjarak dari rumahnya ke sekolah 2,1 KM tetapi menggunakan jasa editan menjadi 500 meter saja. Sama dengan K yang menggunakan alamat palsu agar diterima di SMA 5 Bengkulu dengan jarak 700 M saja walaupun KK aslinya ternyata berjarak 12 KM.

Kasus lain ada yang menggunakan alamat sewa rumah (kontrak) dengan sekolah yang diincarnya seperti yang dilakukan N agar diterima di SMA 7 Tangerang Selatan. Para orangtua berbuat

curang agar anaknya dapat mudah akses masuk PTN karena sekolah bagus lebih banyak peluang diterima. Apalagi di Kota Tangerang Selatan hanya ada 12 SMA Negeri. S orangtua N juga sempat melakukan jasa calo “orang dalam” agar bisa masuk. etapi saat pendaftaran PPDB diminta tambahan “uang pelicin” agar bisa dikontrol peringkat anaknya, tetap sampai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) belum juga bisa diterima malah minta ditambah lagi uang beli “bangku kosong” hingga mengeluarkan biaya “uang hangus” sebesar 24 juta rupiah. Ada juga cerita T agar anaknya masuk SMA 3 Yogyakarta anaknya terpaksa dititipi masuk KK orang lain yang jarak rumahnya dekat sekolah. Semua kejadian di atas bisa saja di pidana dengan pasal 94 UU No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 75 juta rupiah.

Disini Kurnia melihat pemanfaatan jasa titipan numpang KK orang lain, karena ada celah hukum dimana anak titipan dianggap dalam KK anak titipan hubungan dengan Kepala Keluarga adalah “Keluarga Lain” walaupun istilah tersebut tidak ada dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Administrasi Kependudukan. Tetapi dalam isian Formulir F.101 untuk status hubungan dengan Kepala Keluarga ada pilihan “Keluarga” dan “Lainnya”.

Sistem Zonasi memberikan kesempatan yang sama kepada semua sekolah negeri, dalam hal input siswa berdampak pada mutu dan kualitas pendidikan yang sama dan menghilangkan sekolah negeri favorit dan semi favorit. Juga agar sekolah tidak didominasi siswa dari kalangan kelas tertentu sehingga berakibat ketimpangan jenjang sosial, ekonomi, dan tatanan pendidikan antar sekolah. Tetapi dampaknya efek kebangsaan antar siswa satu sekolah berkurang dan tidak berkembang karena keterbatasan siswa di luar zona sekolah tidak dapat masuk kecuali memakai PPDB jalur prestasi dan/ atau afirmasi.

Indonesia data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 terdiri dari 34 Provinsi dan sekarang bertambah menjadi 38 Provinsi dari 514 Kabupaten/ Kota, 7.204 kecamatan dan 83.931 Desa/ Kelurahan. Jumlah SD Negeri ada sebanyak 147.536, dengan 25.885.053 orang murid, Jumlah SMP Negeri 37.023, dengan 10.040.277 murid, Jumlah SMA Negeri 12.689 dengan 4.312.407 murid, Jumlah SMK Negeri 12.659 dengan 4.334.987 murid.

Jika saat itu memakai sistem PPDB Zonasi maka murid SD Negeri akan menghasilkan 0,17 murid per desa atau 2,1 murid per kecamatan atau 28,7 murid per kabupaten/ kota yang berkesempatan sekolah di luar zona rumah tempat tinggal murid. Untuk murid SMP Negeri untuk Desa/Kelurahan angkanya 0,04 murid, 0,18 murid per kecamatan, dan 7,2 murid per Kabupaten/Kota. Membangun negara tanpa memajukan pendidikan akan percuma, bangsa maju harus cerdas, berakarakter dan jujur. Misi kebangsaan setiap anak bangsa pada semangat inklusivisme, interaksi antar anak bangsa dan kebhinekaan perlu dikondisikan sedini mungkin, agar anak di masa sekolah tidak lagi mengenal perbedaan status sosial, latar belakang ekonomi dan budaya, agama, jenis kelamin dan mencegah bullying. Saran Kurnia, agar PPDB dan Seleksi Mahasiswa Baru PTN perlu ditinjau dan diperbaiki lagi. Dunia Pendidikan jangan dirusak dengan ketidakjujuran dan kecurangan. Bangsa yang maju adalah mendahulukan pendidikan tidak ada pembangunan Bangsa Indonesia bisa diraih dengan memprioritaskan Pendidikan. Editor : Rohman

Terminal Kembang Joyo Pati Jadi Sasaran Operasi Polantas

PROGRAM SAMSAT JATENG SPECIAL SUNTUNG 4xLipat

KEGIATAN OPERASI PATUH 2024 DAN SOSIALISASI CRASH PROGRAM SAMSAT JATENG SPECIAL SUNTUNG 4xLIPAT

TERMINAL KEMBANG JOYO, PATI SELASA, 16 JULI 2024

- 1 PEMBEBAHAN BNKB II DALAM DAN LUAR PROVINSI**
Gratis Bea Balik Nama dari dalam Provinsi Jateng dan dari luar Provinsi Jateng
- 2 DISKON PAJAK TAHUN BERJALAN**
Diskon Pajak Kendaraan Tahun Berjalan ketika sebelum jatuh tempo bagi yang taat Pajak
- 3 PEMBEBAHAN BIAYA PAJAK PROGRESIF**
Gratis bagi Wajib Pajak yang memiliki kendaraan lebih dari 1 dengan nama dan alamat yang sama
- 4 KERINGANAN TUNGGAKAN PKB**
Potongan 10% - 50% atas pokok dan denda bagi yang menunggak Pajak Kendaraan 1 - 5 tahun

AKUN RESMI SAMSAT_PATI
CALL CENTER 081328759569

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati melaksanakan kegiatan sosialisasi dan optimalisasi Crash Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) di Terminal Kembang Joyo Pati, Selasa (16/7/2024).

Kapolresta Pati, Kombes Pol. Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Asfauri mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan kegiatan Operasi Patuh Candi 2024 di terminal.

“Kegiatan itu, didasari dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor : ST/799/V/YAN1.2./2024 Tanggal 31 Mei 2024 tentang Glorifikasi dan Amplifikasi Crash Program Pajak Kendaraan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024,” terang Asfauri.

Selama kegiatan berlangsung, ia memberikan edukasi dan Sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak. Untuk personil yang dilibatkan diantaranya, anggota STNK Satlantas Polresta Pati dan UPPD Samsat Pati.

“Kegiatan Sosialisasi Crash Program dan Operasi Patuh 2024 ini dilaksanakan guna meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat serta ketaatan pembayaran pajak, dan yang tertib pajak dapat apresiasi berupa coklat,” ungkapnya.

Dengan harapan, masyarakat Pati semakin disiplin, dan taat dalam berlalu lintas saat berkendara di jalan raya, dengan cara melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan tertib,” pungkasnya. (Rohman)

Jelang Hari Jadi Pati dan HUT RI, Pemkab Gelar Rapat Pleno



Pati – Cakranusantara.net | Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pati ke-701 serta HUT RI ke-79 Pemerintah Kabupaten Pati, Kamis (18/7) menyelenggarakan Rapat Pleno di Ruang Pragola Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Selain dihadiri Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, rapat tersebut juga diikuti oleh Sekda Pati, para Asisten Sekda, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan seluruh ASN yang tergabung dalam kepanitiaan hari jadi Kabupaten Pati ke-701 dan HUT RI ke-79.

Agenda rapat pleno kali ini adalah membahas rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan pada hari jadi Kabupaten Pati dan HUT RI. “Dengan waktu yang tergolong singkat, kami berharap panitia dapat mempersiapkan kedua acara tersebut dengan optimal”, ujar Sekda Pati

Jumani. Selain itu, rapat tersebut juga untuk membahas logo dan tema kedua acara tersebut.

Untuk HUT RI, tema yang telah ditentukan oleh pusat yaitu “Nusantara Baru Indonesia Maju” sedangkan untuk tema hari jadi Kabupaten Pati masih dalam proses pembahasan.

Dalam rapat itu, Pj Bupati Pati mengimbau untuk seluruh panitia agar memaksimalkan persiapannya dan berharap agar acara yang telah diagendakan dapat berlangsung dengan lancar.

“Kami ingin seluruh panitia memperhatikan detail acara secara keseluruhan agar rencana kegiatan dapat berlangsung dengan baik,” pungkasnya.

Polresta Pati Menerima Penghargaan Kompolnas Award 2024



Pati – Cakranusantara.net | Malam penganugerahan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Awards 2024 sukses digelar. Penghargaan diberikan kepada setiap kelompok dari tingkat Mabes hingga Polsek. Salah satunya adalah Polresta Pati.

Penghargaan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu nominasi satker terbaik di tingkat Mabes Polri, polda terbaik kelompok A dan B, polres terbaik kelompok A dan B, serta polsek terbaik kelompok A dan B. Untuk kategori satker Mabes Polri, Kompolnas menetapkan 5 nomine terbaik, yakni Pusdokes Polri, Litbang Polri, Pusdik Binmas Polri, Srena Polri, dan Unit PPA Bareskrim Polri. Posdokes Polri keluar menjadi pemenang.

Kemudian, kategori wilayah tingkat polda tipe A, kompoltas mengusung 5 nominasi, yaitu Polda Daerah Istimewa Yogyakarta,

Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Lampung, dan Polda Sumatera Utara. Polda Sumut keluar menjadi pemenang. Sementara pada tingkat polda tipe B dimenangi oleh Polda Jambi. Adapun nominasinya adalah Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan, Polda Papua, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Sulawesi Tengah.

Kemudian, untuk kategori wilayah tingkat polres tipe A, 5 besar polres terbaik adalah Polresta Pati, Polres Jember, Polresta Jember, Polres Singkawang, dan Polres Tanah Karo. Kategori ini dimenangi oleh Polres Jember. Sementara kategori wilayah tingkat polres tipe B dimenangi oleh Polres Murung Raya. Adapun nominasi adalah Polres Bengkulu, Polres Donggala, Polres Barito Jambi, Polres Karimun, dan Polres Murung Raya.

Lebih lanjut, pada kategori tingkat polsek tipe A, Polsek Singaraja keluar menjadi pemenang. Sementara untuk polda tipe B diraih oleh Polsek Rasifeto Barat. Ketua Harian Kompolnas Benny Jozua Mamoto mengatakan ajang ini digelar sebagai bentuk apresiasi bagi satuan wilayah di Polri yang dianggap maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kompolnas Awards pertama kali digelar pada 2022 sehingga ini merupakan tahun ketiga event tahunan itu diselenggarakan.

“Kompoltas Awards sudah dilaksanakan untuk yang ketiga kali dan ini merupakan wadah dari hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kompoltas,” ujar Ketua Harian Kompoltas Benny Jozua Mamoto di Hotel Discovery, Jakarta Utara, Rabu (17/7/2024).

Benny menyampaikan selamat kepada para pemenang. Dia berharap gelaran Kompoltas Awards dapat menjadi semangat bagi Korps Bhayangkara untuk terus berbenah menjadi lebih baik. “Saya ucapkan selamat kepada para pemenang, karena ini akan memotivasi, akan menciptakan suasana kompetisi yang sehat untuk terus berusaha melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” ucap Benny. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri atas identitas yang sudah terbangun sehingga kami dapat melaksanakan pemilihan ini dengan lancar dan baik,” sambungnya. (Humas Resta Pati)

Menuju Reformasi Agraria, 3 Desa Ditetapkan Sebagai Kawasan TORA



Pati – Cakranusantara.net | Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Senin (22/7), menghadiri acara ekspos hasil pendataan potensi Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) Kabupaten Pati tahun 2024, di ruang Joyokusumo Sekretariat Daerah Pati.

Turut hadir Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pati, Sekretaris Daerah Pati, Perhutani, para pimpinan OPD terkait, Kepolisian, Kodim, dan Kejaksaan.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Pati, Jaka Pramono menyampaikan, bahwa saat ini terdapat 3 desa yang telah ditetapkan sebagai kawasan TORA, diantaranya dua kawasan tanah timbul yaitu Desa Dororejo Kecamatan Tayu dan Desa Bakalan dan Kecamatan Dukuhseti.

Selain itu juga terdapat tanah kawasan hutan yang berada di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu.

“Dari dua desa tanah timbul yang sudah didata, diketahui digunakan sebagai tambak, sedangkan untuk kawasan hutan penggunaannya sebagian besar untuk pemukiman dan lahan garapan,” tuturnya. Adapun untuk progres pelaksanaannya, saat ini sudah mencapai tahap 5 yaitu proses pengumpulan data TORA.

Lebih lanjut ia pun menjelaskan bahwa untuk pelaksanaannya dimulai pada akhir bulan Mei dan diprediksi hingga awal Agustus. Namun saat ini sudah selesai di bulan Juli, serta telah dilakukan pelaporan.

“Masih ada tahapan-tahapan lain yang perlu dilakukan. Pelaksanaan ini diprediksi akan selesai pada akhir tahun, namun diharap dapat menuntaskannya sesegera mungkin,” imbuhnya. Sementara itu, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro berharap dengan dilakukan audiensi bersama pihak terkait yang ada kaitannya dengan reformasi agraria, dimana 3 Desa di Kabupaten Pati ditetapkan sebagai kawasan TORA, semoga ke depan tidak ada permasalahan yang mungkin akan menghambat progres menuju reformasi agraria. “Kami berharap semoga dalam pelaksanaannya tidak ada permasalahan ataupun urusan hukum yang rumit sehingga dapat terselesaikan dengan baik”, pungkasnya. Editor : Rohman

Polisi Amankan Puluhan Pelajar Pesta Miras dan Diduga Hendak Tawuran di Pati



Cakranusantara.net, Pati | Polresta Pati mengamankan sebanyak 30 Pelajar karena tertangkap sedang berpesta minuman keras (miras) dan terindikasi hendak melakukan aksi penyerangan atau tawuran, Jumat (02/08/2024).

“Personel mengamankan 30 orang pelajar dari sekolah menengah atas dan kejuruan di Pati. Mereka terindikasi akan melakukan penyerangan secara berkelompok,” kata Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kapolsek Pati Kota Iptu Heru Purnomo. Dia menuturkan personel Polsek Pati dan Personil Dalmas Ton 1 Sat Samapta Polresta Pati mengamankan 30 Orang pelajar sekira 13.15 WIB saat berkumpul di Makam Thiongwa Dk. Ngagul Kec. Pati, sedang pesta miras dan diduga akan melakukan aksi tawuran. “Selanjutnya sebanyak 30 Pelajar tersebut diamankan dibawa ke Mapolsek Pati Kota untuk dilakukan identifikasi, pembinaan

dengan menghadirkan Orangtua/wali murid dan Pihak Sekolah”, ungkapnya. Kapolsek Pati Kota menuturkan polisi juga mengamankan 4 botol @1500 ml berisi Miras jenis arak putih dan 14 sepeda motor milik pelajar tersebut. “Dari hasil pemeriksaan awal terhadap para pelajar tersebut diduga ada yang ikut kelompok komunitas Genk Motor, diantaranya Genk Bokor, Genk Bewe, Kampung Utara 23, pati Gangster, Gangs Bandit dan Gank Haik”, tandasnya. Atas kejadian tersebut Kapolsek menjelaskan Upaya dan langkah-langkah yang diambil oleh Polsek Pati dengan mengundang Orang Tua/ wali daripada para pelajar, mengundang pihak Kepala sekolah, memberlakukan wajib lapor ke Polsek Pati bagi para pelajar yang terlibat dan Bagi pelajar yang membawa Sepeda motor dapat diambil setelah dapat menunjukkan Surat-surat Bukti kepemilikan. (Humas)

Kios Es Teh di Juwana Jadi Sasaran Maling



Pati – Cakranusantara.net | Kios Es Teh vip di jadi sasaran Maling, Polsek Juwana, Polresta Pati berhasil ungkap kasus pencurian dengan pemberatan turut Desa Kudukeras Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kapolsek Juwana AKP Ali Mahmudi mengatakan Seorang tersangka berinisial AJ (26) warga Kandang mas, Dawe Kudus berhasil diamankan polisi.

kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Juwana diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan”, lanjutnya. Kapolsek menambahkan telah mengamankan barang bukti Sepeda motor, Jaket lengan panjang warna hitam, Helm, Tang besi, Drei obeng plus minus, Pengait kunci gembok, Gembok besi, Mesin cup sealer dan 1 tabung gas LPG 3 kg warna hijau.

“Atas perbuatannya Tersangka disangkakan dengan Pasal 363 KUHPidana tentang tindak pidana pencucian dengan pemberatan”, pungkasnya. (Humas)

“Tersangka melakukan pencurian yaitu pada malam hari membuka pintu kios dengan cara merusak kunci gembok pintu kios dengan alat bantu drei obeng dan tang kemudian pelaku masuk kedalam kios mengambil barang berupa 1 mesin Cup Sealer dan 1 tabung gas LPG 3 kg”, ungkapnya.

Kapolsek Juwana menyampaikan bahwa waktu kejadian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB. Setelah mendapatkan laporan kejadian Polsek Juwana melakukan penyelidikan dan didapati ciri-ciri pelaku serta keberadaan pelaku di daerah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

“Unit Reskrim Polsek Juwana berkoordinasi dengan anggota Resmob Polres Kudus melakukan penangkapan terhadap tersangka beserta barang bukti

Ratusan Karyawan PT Sejin di Pati Alami Keracunan, Wartawan Dilarang Masuk Liputan



Pati – Cakranusantara.net | Ratusan Karyawan PT. Sejin yang berada di wilayah Kabupaten Pati diduga Keracunan makanan. Ironisnya, Wartawan dilarang masuk untuk Liputan

Data yang dihimpun media ini, jumlah karyawan yang telah mengalami kondisi kurang baik-baik saja dan harus dilarikan ke Lima Rumah Sakit terdekat mencapai 286 orang didominasi 35 orang rawat inap. Adapun daftar rumah sakit

tersebut adalah, Keluarga Sehat (KSH), Mitra Bangsa, RSUD Soewondo Pati, dan RS Fastabiq, serta 1 RS yang terletak di luar kota yakni RS Nurussyifa Kudus sebanyak 84 Karyawan. Mulyono, kepala penjaga keamanan mengatakan, bahwa media dilarang masuk untuk melakukan



liputan kedalam ada hal yang privasi, ia klaim bisa memberikan keterangan.

“Wartawan tidak boleh masuk melakukan liputan ke tempat kejadian perkara (TKP). Bak ada yang ditutup-tutupi, Mulyono klaim jika karyawan yang mengalami keracunan hanya sekitar seratusan orang, dan itupun sudah membaik dan kembali,” terang Mulyono, Selasa (16/7/2024).

Namun faktanya, setelah tim awak media menelusuri ke RS terdekat, para Karyawan masih berbaring lemes di Rumah Sakit. Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum mendapatkan keterangan dari para-pihak terkait. (Red).

Kurang dari 24 Jam, Polisi Berhasil Ringkus Tersangka Curanmor di Sukolilo Pati



Pati – Cakranusantara.net | Dalam waktu kurang dari 24 jam, Polsek Sukolilo telah berhasil mengungkap Kasus Pencurian Motor di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Teras Halaman rumah warga Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Kasus pencurian Sepeda motor Motor Honda Beat warna hitam tersebut terjadi pada Rabu, 17 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kapolsek Sukolilo AKP Sahlan mengungkapkan tersangka

berinisial ST (56) Warga Desa Jimbaran Kayen Pati, yang merupakan Residivis Kasus Curanmor Roda Dua.

“Setelah menerima Laporan Polsek Sukolilo melakukan olah TKP, dari hasil olah TKP petugas mendapat informasi mengenai ciri-ciri pelaku. Kemudian petugas mencari keberadaan pelaku, lalu pada

hari yang sama yaitu Rabu, 17 Juli 2024 sekira Pkl 18.30 WIB, petugas berhasil mengamankan Tersangka di pinggir Jalan Raya Cengkalsewu-Kudus turut Desa Bulucangkring Jekulo Kudus”, ungkapny.

Kapolsek menjelaskan, pada waktu itu Tersangka sedang mengendari Motor Honda Vario warna Putih Silver yang merupakan Hasil Curian TKP Kayen. Selanjutnya petugas menyita Barang Bukti Motor Honda Beat warna hitam hasil curian TKP Sukolilo yang disimpan Tersangka di Desa Kesambi Kecamatan Mejobo Kudus.

“Tersangka rencana mau Kabur ke Pulau Bali karena tahu rumahnya digrebek petugas, sudah membawa

bekal dan tas besar”, Lanjut Kapolsek.

Lalu Tersangka dan Barang Bukti berupa Motor Honda Beat hitam hasil curian TKP Sukolilo dan Motor Honda Vario warna Putih Silver Hasil Curian TKP Kayen, dibawa ke Mapolsek Sukolilo untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Atas perbuatannya, Tersangka curanmor ini disangka melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara”, pungkasnya. (Humas)

Dandim Berikan Wejangan dan Wawasan Kebangsaan di SMAN 1 Pati



Pati – **Cakranusantara.net** | SMAN 1 Pati menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kepada 410 siswa baru. Tujuannya adalah untuk mengenali potensi peserta didik baru serta menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif untuk peserta didik serta membentuk karakter

siswa baru.

Dalam kegiatan MPLS tersebut Dandim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos turut diundang sebagai salah satu narasumber untuk memberikan wejangan serta menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan, Selasa (23/07/2024).

“Apabila ingin menjadi orang yang sukses dan sehat, harus selalu belajar untuk menjadi baik dan selalu hidup untuk menjadi sehat,” hal tersebut disampaikan Dandim Pati pada awal materi kegiatan.

Menurutnya, hal ini penting untuk disampaikan untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas yang akan melanjutkan estafet dari pada kepala sekolah dan semua

pengajar termasuk komandan kodim. “Karena saya tahu SMA negeri 1 Pati telah melahirkan orang-orang hebat,” kata Dandim.

Dandim juga mengingatkan, pada kegiatan MPLS ini dan seterusnya, jangan ada kekerasan di lingkungan sekolah dengan fokus pada belajar. “Jangan ada genk-genk di sekolah. Ingat orang tua di rumah mengharapkan anaknya menjadi orang yang berhasil,” sambung Dandim.

“Nantinya adik-adik semua akan ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, polisi atau pejabat dan profesi lainnya. Saya berpesan, enyamlah pendidikan yang baik sesuai kemampuan secara terukur, dan tunjukkan melalui prestasi,” tandas Dandim. Turut hadir mendampingi Dandim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S. Sos diantaranya Kepala Sekolah SMA N 1 Pati Alek Suhartono, S.Pd., M.Pd beserta panitia, Pjs. Pasi Pers kodim 0718/Pati Kapten Inf Andik Setiawan serta Danramil 01/Pati Kapten Inf Yahudi., S.Sos

PPDB SMAN 2 Pati Simpel Dibuat Ribet, Ada Dugaan Pemalsuan Dokumen dan Jual Beli Bangku Kelas



Pati – **Cakranusantara.net** | Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 2 Pati ada dugaan pemalsuan dokumen. Pasalnya, jika datanya tidak dipalsukan tidak bisa masuk ke sekolah yang dituju, Kamis (18/7/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, mendapati pengakuan orang tua calon murid pada sekolah SMAN 2 Pati, bahwa indikasi pemalsuan dokumen tersebut sebagai syarat agar bisa diterima di sekolah yang dituju.

“Supaya dapat diterima, diduga harus palsukan usia dijadikan setengah sampai setahun lebih tua. Pada awalnya, anak tersebut baru berumur dibawah 15 tahun, agar bisa diterima di sekolah SMAN 2 Pati maka usianya harus dibuat minimal 15, 9 tahun,” ungkap salah satu orang tua calon murid yang tidak perlu untuk disebutkan namanya belum lama ini.

Sementara, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Pati, Sudarto saat dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran dalam penerimaan PPDB itu mengaku bahwa tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut. Ia hanya bisa memantau saja, sebab yang memiliki kewenangan adalah Dinas Pendidikan provinsi.

“Yang memiliki kewenangan, masalah diterima atau tidaknya tentang penerimaan PPDB adalah wewenang provinsi Jateng, bukan pihak sekolah, termasuk masalah bangku cadangan,” jawabnya belum lama ini.

Saat disinggung masalah adanya main mata, dengan cara meminta uang yang nominalnya bervariasi mulai dari Rp 20 sampai 50 juta, Sudarto menepis isu tersebut.

“Kalau ada yang minta uang sebanyak itu tidaklah benar, yang jelas ia tidak melakukan hal tersebut,” tepisnya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum koordinasi atau klarifikasi ke pihak terkait lainnya, guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Rohman



Pemdes Sedayu Gelar Merti Desa Ditengarai Dengan Pengajian Bersama Gus Munafik



Cakranusantara.net, Kendal | Pemerintah Desa (Pemdes) Sedayu, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal menyelenggarakan acara Merti Desa. Kegiatan ini juga diisi dengan Pengajian umum sekaligus mendo'akan para leluhur di halaman kantor desa setempat, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Kegiatan itu di hadiri ribuan pengunjung dari berbagai wilayah. Ini juga berkat kerja sama antara Pengurus Ranting NU dengan pemerintah desa.

Pengajian Akbar sekaligus memperingati haul sesepuh dan merti Desa menghadirkan penceramah kondang, KH. Ahmad Muwafik yang

akrab disapa Gus Muwafik dari sleman dan KH. Sukri Maulana dari Batang.

Sebelum acara Pemdes dan pengurus Ranting NU desa sedayu serta panitia memberikan santunan kepada anak yatim piatu sejumlah 20. Sekertaris Desa (Sekdes) Muhammad Yasin mewakili Pemdes mengatakan, pengajian umum Haul Masyayikh ini untuk mengenang para masyayikh atau sesepuh yang telah berjuang memajukan Desa.

Oleh karena itu, sebagai generasi penerus memberikan penghormatan. Ini juga sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi dengan warga.

"Pengajian ini untuk mengenang para sesepuh desa, berkat jasa-jasa beliau, desa ini menjadi maju. Sehingga kami akan meneruskannya," katanya.

Yasin juga mengatakan, pengajian umum ini akan dijadikan agenda rutin sebagai program Pemdes. alhamdulillah pengajian dibarengkan dengan acara Merti Desa berjalan dengan khidmat.

"Untuk tahun depan, insya Allah pengajian akan menggelar rangkaian acara kirab budaya antar RT, semoga bisa terlaksana dengan baik," jelasnya. Pemdes mengucapkan terimakasih kepada Panitia telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran seluruh jajaran Ranting NU Desa sedayu, Fatayat Muslimat NU serta Banser dan Banomnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Mustaqim mengatakan, kegiatan ini untuk menjalin kebersamaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dengan pengajian diharapkan, semakin lebih menyadarkan masyarakat tentang pentingnya agama dan ibadah.

"Kegiatan ini kerjasama antara Pemdes dengan Ranting NU untuk bersama-sama, yang rencananya tiap tahun digelar pada bulan syuro. Untuk tahun depan insya Allah akan menggelar kirab budaya yang diikuti peserta tiap RT masing masing. Teguh, editor : Rohman

Pemkab Pati Gelar Festival Wangi Pradesa

Cakranusantara.net, Pati | Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Ke-701 Kabupaten Pati dan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pati menggelar Festival Wangi Pradesa.

Dalam kegiatan ini, Pemkab Pati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bekerjasama dengan Program Jalur Rempah Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemdikbudristek Republik Indonesia.

Plt Kepala Disdikbud Pati Tulus Budiharjo mengatakan, rangkaian kegiatan festival telah dimulai pada 15 Juli lalu melalui kegiatan workshop penguatan kapasitas.

Acara dilanjutkan dengan Sarasehan Kebudayaan pada 25 Juli dan 15 Agustus 2024. Kemudian Live Art Mural pada 25 Juli hingga 3 Agustus 2024. Selanjutnya pada 6 sampai 11 Agustus di halaman Stadion Joyokusumo dilangsungkan kegiatan pameran UMKM, pertunjukan seni, dan pameran fotografi.

Pada 9 Agustus dilakukan Pemilihan Duta Budaya di halaman Stadion Joyokusumo dan Karnaval Budaya dengan rute dari depan Gedung Eks Bakorwil sampai Alun-Alun Pati.

Terakhir, 15 Agustus 2024 dilakukan pemutaran video sinematik jalur rempah di Pendopo Kabupaten Pati. "Festival budaya dan jalur rempah ini mengangkat tema 'Wangi Pradesa'. Adapun penamaan wangi memiliki arti harum. Dan pradesa diambil dari bahasa Sansekerta, pradeca, yang berarti daerah atau wilayah. Sehingga kami harapkan festival ini dapat membawa dampak nyata berupa meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Pati dengan memanfaatkan potensi kebudayaan jalur rempah," ucap Tulus dalam seremoni Pembukaan Festival Wangi Pradesa di halaman Stadion Joyokusumo Pati, Selasa (6/8/2024).

Ia juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pelestarian budaya jalur rempah, khususnya di Kabupaten Pati.

"Kemudian kegiatan Pameran UMKM yang diikuti 50 stan ini diharapkan dapat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pati yang berbasis kearifan lokal," tandasnya.



Sementara itu, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya festival ini sebagai bagian dari kemeriahan peringatan 701 tahun Kabupaten Pati dan 79 tahun Republik Indonesia. "Apa yang sudah diselenggarakan panitia dalam peringatan 701 tahun Kabupaten Pati ini kami beri apresiasi setinggi-tingginya," ucapnya.

Menurut Henggar, Wangi Pradesa mengandung makna yang sangat agung bahwa Kabupaten Pati merupakan salah satu penghasil rempah-rempah yang banyak bermanfaat.

Dia juga berharap festival ini bisa mengenalkan budaya rempah-rempah kepada anak-anak muda. **

Sekda Kendal Tegaskan Netralitas ASN Dalam Pilkada 2024



Cakranusantara.net, Kendal | Sekretariat Daerah (Sekda) Kendal Ir Sugiono kembali menegaskan kaitan netralitas ASN dalam menghadapi Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Bahwa aparatur negara tidak diperkenankan untuk berpolitik, atau mendukung salah satu calon Gubernur/ Wakil Gubernur maupun calon Bupati/ Wakil Bupati. Penegasan tersebut dikatakan Sekda saat memberi pengarahan bagi ASN di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Selasa (6/8/2024).

Masih lanjutnya, bila ASN diketahui melakukan pelanggaran kaitan netralitas, bisa dikenakan sanksi administrasi maupun denda. Oleh sebab itu, netralitas harus tetap di kedepankan.

“Bila terbukti melanggar sanksinya cukup jelas, sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Sekda.

Sebagai pembina ASN, pihaknya berharap agar himbauan ini benar-benar dilaksanakan. Sosialisasi seperti ini akan terus dilakukan ke seluruh jajaran.

“Mereka juga di himbau untuk mempergunakan hak pilih, dan menganggapnya biasa, sebab sudah dilaksanakan tiap lima tahun sekali. Sehingga tidak mempengaruhi orang lain tentang pilihannya,” himbau Sugiono.

Sebelumnya, Pemkab Kendal telah memberikan sosialisasi tentang netralitas pada kepala-kepala dan jajarannya.

Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Kelurahan (Kalur) dan tamu undangan lainnya. Teguh

Kejari Pati Bersama Kantor Bea Cukai Ungkap Kasus Pemalsuan Pita, Tiga Orang Jadi Tersangka

Cakranusantara.net, Pati | Kejaksaaan Negeri Pati (Kejari) Pati bersama dengan Kepala Kantor Bea Cukai berhasil ungkap kasus pemalsuan pita cukai, Tiga Orang telah ditetapkan menjadi tersangka, Kamis (8/8/2024).

Kajari Pati, Pipiet Suryo Priarto Wibowo, S.H., M.H yang didampingi oleh Kasi Pidsus, Kepala Kantor Bea Cukai Kudus dan Kanwil Bea Cukai Jateng menuturkan, bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka lengkap dengan barang bukti yang cukup dari penyidik Bea Cukai Kudus terkait pengungkapan jaringan pemalsuan pita yang berhubungan dengan pendapatan negara.

“Pemalsuan itu, berpotensi merugikan kas Negara, dimana barang bukti yang diserahkan dari pihak bea cukai sudah cukup bukti, diantaranya satu unit pick up dengan plat nomor E 8365 MK, serta pita jenis SKT sebanyak 749 lembar, maka selanjutnya akan di proses ke persidangan,” tegas Pipiet.

Pihaknya mengapresiasi tim penyidik bea cukai yang sudah berhasil mengungkap tindak kejahatan pemalsuan pita juga oleh penyidik Kantor Bea Cukai Kudus.

“Untuk berkas formal dan material sudah memenuhi syarat untuk bisa diajukan ke persidangan, dan perkara ini akan segera kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati, semoga segera mendapatkan putusan yang kekuatan hukum tetap,” tandas Kajari Pati.

Sementara, Lenni Ika Wahyudiasti,



Kepala Kantor Bea Cukai Kudus mengaku, bahwa pihaknya mendapatkan informasi ada pemasokan pita cukai palsu ke Jawa Timur (Jatim), kemudian membentuk Tim Gabungan dari Bea Cukai Kudus, Kanwil Jateng, DIY, serta Kanwil Jatim II yang bersama-sama melakukan operasi.

“Penindakan itu dilakukan dengan cara, menghentikan sebuah sarana pengangkut, berupa mobil Pick up merek Mitsubishi tipe L300 warna hitam pada Rabu, 12 Juni 2024, sekira pukul 00.15 WIB, di Jl Raya Pati-Kudus KM 4, Desa/ Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati,” ujar Ika.

“Hasil pemeriksaan, didalam mobil ditemukan 749 lembar pita cukai yang diduga palsu, disembunyikan dibelakang kursi penumpang dan 10 karung tembakau bagian belakang. Berdasarkan bukti permulaan inisial MN (57) ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan sopir AK (45) dan penumpang AS (46) sebagai saksi,” terang Kepala Bea Cukai Kudus.

Hasil pengembangan kasus tersebut, MN mendapatkan pita cukai dari M (52) warga Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Namun pita cukai tersebut diperoleh dari tersangka K (47) warga Desa Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

“Kegiatan membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual,

menawarkan, menyerahkan, dan menyediakan untuk dijual dianggap telah melanggar hukum disangkakan Pasal 55 huruf b Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali lipat, dan paling banyak 20 kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar,” tegas Lenni Ika Wahyudiasti, Kepala Kantor Bea Cukai Kudus dalam Konferensi Pers di Aulia Kantor Kejari Pati. Rohman

Latkatpuan Humas Polda Jateng ; Membina Komunikasi Harmonis Dengan Publik



Cakranusantara.net, Semarang | Dalam rangka menyambut Pemilukada 2024, Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Jateng komitmen untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat.

Upaya ini diwujudkan melalui pelatihan yang diberikan kepada personel Humas di jajaran Polda Jateng, bertajuk Latihan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan), yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Muria Semarang, Kamis (8/8/2024).

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa menjelang Pemilukada, peran Humas menjadi semakin penting, bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun rasa aman dan tenang di tengah masyarakat.

“Kita ingin masyarakat merasa terlindungi dan terinformasi dengan baik, apalagi di tahun politik seperti ini,” ujarnya dengan penuh empati. Kombes Pol Artanto menekankan pentingnya peran Humas sebagai jembatan antara Polri dan masyarakat. Dia berharap agar personel Humas di seluruh jajaran Polda Jateng dapat menjalin hubungan erat dengan media dan para influencer, menciptakan kolaborasi yang membawa manfaat positif bagi masyarakat.

“Dengan kerjasama yang baik, kita bisa memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya akurat, tetapi juga menenangkan,” tambahnya.

Selama pelatihan, personel Humas tidak hanya dibekali dengan keterampilan jurnalistik, tetapi juga diajarkan cara menggunakan teknologi modern yang dapat membantu mereka menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan tepat.

“Kita ingin Humas menjadi bagian dari solusi, menjadi penyejuk di tengah hiruk-pikuk tahun politik ini,” lanjut Artanto.

Kabidhumas juga berharap bahwa Latkatpuan ini bisa menjadikan Humas sebagai “Cooling system” yang efektif selama Pemilukada 2024. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi yang benar, tetapi juga merasa tenang dan aman di tengah berbagai dinamika yang terjadi.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga suasana yang damai dan harmonis,” tutupnya dengan penuh harapan.

Melalui pelatihan ini, Polda Jateng menunjukkan kesungguhannya dalam melayani masyarakat dengan lebih baik. Dengan mengedepankan komunikasi yang humanis dan inklusif, Polri berusaha memastikan bahwa setiap warga merasa didengar dan dilindungi. Bersama-sama, kita bisa menghadapi Pemilukada 2024 dengan optimisme dan keyakinan bahwa keamanan dan ketertiban akan selalu terjaga. **

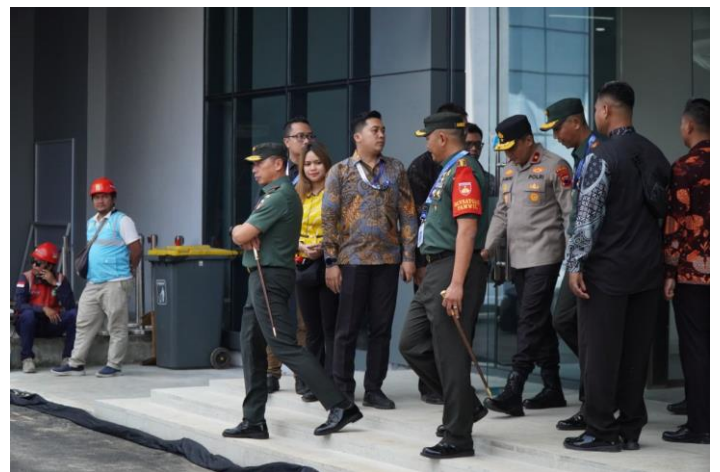
TNI-Polri Bersinergi Pengamanan Kunjungan Presiden Jokowi

Cakranusantara.net, Kendal | Kapolda Jateng Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo didampingi sejumlah PJU Polda Jateng melaksanakan asistensi pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di wilayah hukum Polres Kendal pada Rabu, (7/8/2024) siang.

Hal ini untuk menjamin keamanan dan kelancaran kunjungan Presiden Jokowi dan rombongan dalam rangka meresmikan PT Indonesia BTR Energy Material di Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Kendal.

Sebanyak 618 personil gabungan TNI Polri yang diterjunkan dalam kegiatan pengamanan VVIP. Rangkaian pengamanan diawali dengan Apel Persiapan Pengamanan VVIP yang dipimpin oleh Dandim 0715 Kendal Letkol Inf. Ely Purwadi di PT Golden Snack Sejahtera, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal pada pagi harinya. Dari ratusan personil gabungan TNI Polri yang diturunkan untuk menjalankan tugas pengamanan, sebanyak 286 personil dari Polres Kendal dikerahkan dalam kegiatan pengamanan. Dibawah kendali Kapolres Kendal AKBP Fera Kurniawan, para personil Polri tersebut akan mengamankan jalur lintasan VVIP serta sejumlah titik ring 3 di area kunjungan.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menegaskan bahwa kegiatan asistensi pengamanan oleh Kapolda Jateng merupakan



bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan mendukung program pembangunan nasional oleh pemerintah.

Pengamanan yang dilakukan itu adalah bagian dari kontribusi Polri untuk menciptakan sitkamtibmas yang kondusif di wilayah, sehingga berbagai program pembangunan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

“Polda Jateng berkomitmen penuh untuk memberikan jaminan keamanan di wilayah, terutama dalam kegiatan penting seperti ini. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan penuh Polda Jateng terhadap program pemerintah dalam upaya pembangunan nasional,” tandasnya. **

701 Tahun Kabupaten Pati Sarat Capaian Pembangunan dan Prestasi

Cakranusantara.net, Pati | Jelang peringatan hari jadinya yang ke-701 tahun, Kabupaten Pati mendapatkan hadiah istimewa berupa tercapainya sejumlah target pembangunan dan diraihnya penghargaan di berbagai bidang. Hal itu terungkap dari paparan Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, dalam pidatonya saat Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi, yang digelar Selasa malam (6/8), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pati

Dalam rapat yang digelar H-1 sebelum hari jadi tersebut, terungkap bahwa sejumlah proyek-proyek pembangunan prioritas yang dapat terlaksana dengan baik, diantaranya adalah rehabilitasi dan pelebaran jalan di beberapa ruas jalan kecamatan, Renovasi Gedung Kantor Labkesda, Ruang Cathlab RSUD RAA Soewondo, dan Puskesmas Pucakwangi II, pembangunan Makodim 0718/Pati, penataan lahan parkir kompleks Makam Syeh Jangkung, serta proyek-proyek infrastruktur lainnya yang juga bisa terlaksana dengan baik sesuai target yang diharapkan.

Di samping itu, lanjut Henggar, pelaksanaan reformasi birokrasi pun dapat terus dipacu dan dioptimalkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional, transparan serta akuntabel, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. “Komitmen terwujudnya good government juga terlihat secara nyata setelah Pemkab mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah”, tegasnya. Pencapaian ini, imbuh Henggar, diharapkan menjadi motivasi bagi semua pihak agar mampu secara konsisten mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Begitu pula dengan semangat untuk selalu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang terus kami pacu agar dapat membawa nuansa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan”, tutur Pj Bupati. Dalam pidatonya, Pj Henggar juga menyinggung soal profesionalitas kinerja pelayanan publik yang selama ini telah diupayakan. “Alhamdulillah kami berhasil mendapatkan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan

kategori kualitas tertinggi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Predikat ini tentunya tidak akan membuat kami berhenti, tapi justru akan menjadi stimulan bagi seluruh satuan perangkat daerah agar terus meningkatkan kinerja dalam seluruh aspek melalui implementasi standar pelayanan publik, pemanfaatan unit layanan pengaduan, peningkatan kualitas layanan serta pengembangan inovasi”, paparnya. Pemerintah Kabupaten Pati, menurut Henggar, juga terus aktif mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai investasi daerah yang terus meningkat sehingga lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha semakin terbuka lebar.

“Berbagai intervensi dan langkah strategis pun terus kami upayakan dalam rangka menekan angka kemiskinan ekstrem yang alhamdulillah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sehingga dengan kerjasama, kolaborasi dan integrasi dari para mitra pembangunan diharapkan pada tahun 2024 ini angka kemiskinan ekstrem dapat terselesaikan sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem”, tambahnya. Kesungguhan Pemkab, sambung Henggar, juga tercermin dari komitmen dalam membangun partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan, hingga Pati mampu meraih Penghargaan Adipura Tahun 2023 dari Presiden Republik Indonesia untuk kategori kota kecil. “Penghargaan ini kami jadikan pemacu untuk menerapkan pertumbuhan ekonomi hijau serta menyelaraskan fungsi sosial dan ekologis dalam proses pembangunan”, tambahnya. Selain dihadiri Pj Bupati, rapat paripurna istimewa tersebut juga diikuti oleh ketua beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pati, kemudian nampak pula Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, serta para pimpinan instansi vertikal. Dalam kesempatan itu, Henggar pun menyatakan rasa syukurnya karena peringatan hari jadi kali ini dapat dirayakan dengan penuh kemeriahan dan kebahagiaan.

“Serangkaian event dikemas begitu apik dalam Wangi Pradesa Festival Rempah dan Budaya Pati 2024 dari mulai sarasehan budaya, pameran mural, pameran fotografi, pameran UMKM, pertunjukan seni, karnaval budaya, duta budaya, pertunjukan kethoprak, jalan santai, festival olahraga tradisional dan event-event lainnya yang dihadirkan di tengah



masyarakat sebagai bagian dari upaya pemajuan obyek kebudayaan dan sebagai platform untuk mengangkat potensi lokal serta produk unggulan Kabupaten Pati”, jelas Pj Bupati dalam pidatonya.

Selaras dengan tema peringatan hari jadi ke-701 Kabupaten Pati, lanjut Henggar, perayaan kali ini diharapkan bisa menjadi tonggak dalam menyatukan tekad untuk Bergerak Bersama untuk Pati Maju dan Sejahtera. “Penyatuan tekad untuk bergerak bersama menjadi hal krusial karena jika segala sesuatu kita upayakan bersama-sama dengan penuh kerukunan maka kondisi ideal yang kita cita-citakan akan tercapai secara paripurna”, tandasnya.

Untuk mewujudkan hal itu, imbuh Pj Bupati, dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi dari berbagai komponen masyarakat, guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang tertera dalam RPJPD Kabupaten Pati 2005-2025 yakni Pati Bumi Mina Tani Sejahtera. “Dan alhamdulillah, amanah yang dipercayakan kepada saya selaku Penjabat Bupati Pati telah berjalan selama dua tahun. Tentunya tanggung jawab ini bukanlah sebuah hal yang mudah untuk saya jalankan sendiri. Untuk itu, tak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak baik di jajaran eksekutif, legislatif, instansi vertikal, maupun elemen masyarakat lainnya atas kerjasama dan soliditas yang terjalin dengan baik selama ini”, tutur Henggar. Ia pun menyadari sepenuhnya, berbagai keberhasilan tersebut adalah cerminan dari hasil kerja bersama sekaligus wujud soliditas, dan kekompakan dari eksekutif, legislatif, TNI/POLRI, para tokoh agama dan masyarakat serta seluruh komponen lainnya yang memiliki satu tujuan, yakni untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Pati di segala bidang kehidupan. Di akhir pidatonya, Henggar tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah menjadi mitra kerja Pemkab dalam mencapai target-target pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Pati. “Besar harapan saya, sinergitas yang telah terjalin antara seluruh komponen dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan di masa yang akan datang”, pungkasnya. **

Upacara Hari Jadi Pati ke-701, Henggar Ajak Semua Elemen Bersatu untuk Pati



Cakranusantara.net, Pati | Dalam suasana khidmat, Pemerintah Kabupaten Pati menggelar Upacara Hari Jadi ke-701 di Alun-Alun Pati, Rabu (7/8/2024).

Acara yang dihadiri oleh Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Pati, serta masyarakat ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang Kabupaten Pati dan menyongsong masa depan yang lebih cerah. Selain upacara, rangkaian peringatan Hari Jadi Pati juga dimeriahkan dengan Festival Wangi Pradesa yang digelar di Stadion Joyokusumo mulai tanggal 6 hingga 11 Agustus 2024. Festival ini menampilkan berbagai kegiatan budaya, seni, dan kuliner khas Pati. Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, menyampaikan apresiasi atas berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Kabupaten Pati.

“Berbagai perubahan positif telah kita rasakan bersama, baik di bidang lingkungan hidup, olahraga, kesehatan, maupun sektor lainnya. Banyak potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Pati dan telah mendapatkan pengakuan di tingkat regional maupun nasional,” ujar Pj Bupati. Pj Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga dan meningkatkan prestasi yang telah diraih. “Kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah kita capai. Tantangan ke depan akan semakin kompleks, sehingga kita perlu terus berinovasi dan bekerja sama untuk mengatasi berbagai permasalahan,” tegasnya.

Mengacu pada tema Hari Jadi tahun ini, “Bergerak Bersama untuk Pati Maju dan Sejahtera”, Pj Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu membangun Kabupaten Pati. “Mari kita satukan tekad untuk menciptakan Kabupaten Pati yang aman, nyaman, dan sejahtera. Setiap individu memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita bersama ini,” pungkasnya. Usai upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan ziarah ke Makam Tombronegoro sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang telah berjasa membangun Kabupaten Pati. **

Survey Penilaian Integritas di Kabupaten Pati Peroleh Nilai Cukup Baik

Pati – Cakranusantara.net | Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Selasa (16/7), melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pati. Dalam kunjungannya tersebut, KPK RI memberikan sosialisasi dan koordinasi terkait pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Pati. Selain dihadiri Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, kegiatan tersebut juga diikuti oleh Sekda Pati Jumani beserta seluruh Kepala OPD terkait. Ditemui usai kegiatan, Pj Bupati menyampaikan rasa terima kasihnya kepada perwakilan KPK RI yang telah memberikan sosialisasi serta wawasan dalam hal



pencegahan korupsi. Menurutnya, banyak ilmu yang dapat diambil dari kegiatan ini, yang nantinya akan menjadi bekal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di seluruh instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Pati. “Kita harus melakukan pembenahan-pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga melakukan pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang muncul”, ungkap Henggar. Pihaknya berharap pendampingan dari KPK RI ini, dapat menjadi bekal dalam mempertanggungjawabkan pengalokasian anggaran keuangan di Kabupaten Pati. Sementara itu perwakilan Tim Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Azril Zah, menjelaskan bahwa rapat yang terkait tentang survey penilaian integritas di Kabupaten Pati memperoleh nilai yang cukup baik, dengan skor diatas 80.

Menurutnya hasil nilai tersebut sudah dirinci, yang kemudian disampaikan tentang apa-apa yang harus diperbaiki. Baik itu dari sisi pelayanan publik hingga pengadaan barang dan jasa. “Kami juga menyampaikan juga terkait dengan hasil MCP. Jadi kita punya program namanya MCP (Monitoring Center For Prevention) yang mencakup 8 area. Area perbaikan untuk seluruh Pemda seluruh Indonesia dan hasilnya kita sampaikan, kita evaluasi” ungkap Azril Zah. Dari hasil evaluasi tersebut, lanjut Azril Zah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan diperbaiki dan percepatan yakni meliputi perizinan dan pendapatan daerah.

“Hari ini kami menurunkan beberapa tim ya ke Pati. Satu ke DPRD, dua ke Pemkab. Nanti juga ada rapat lagi yang terkait dengan pelayanan publik khususnya di penyidikan. Nanti kami juga akan melakukan sesi khusus terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta proyek-proyek strategis yang ada di Pemkab Pati. Jadi kita melakukan pencegahan dari awal terkait proyek-proyek infrastruktur yang ada disini”, pungkasnya

Desa Gunungsari Tlogowungu Jadi Sasaran KKB



Pati – Cakranusantara.net | Penjabat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pati, Faiza Henggar, Rabu (17/7), mengunjungi Desa Wisata Gunungsari Kecamatan Tlogowungu.

Kedatangannya tersebut untuk memberikan sosialisasi dan edukasi untuk kader PKK setempat terkait program Kampung Keluarga Berkualitas (KKB), desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (RPPA). Mengawali sosialisasinya, Faiza mengapresiasi Desa Gunungsari yang kebetulan telah dikukuhkan sebagai desa wisata pada Senin (15/7) lalu. Hal itu, lanjutnya, dapat menjadi nilai positif jika predikat desa wisata ini disinergikan dengan Kampung Keluarga Berkualitas (KB). “Jadi nanti harapannya, kegiatan-kegiatan di desa wisata itu dapat dimasukkan di websitenya kampung KB. Jadi nanti masyarakat tahu kalau di Desa Gunungsari adalah Desa Wisata”, ungkap Faiza.

Menurutnya, informasi itulah nanti yang dapat mempermudah masyarakat saat mencari informasi tentang wisata yang ada di Pati. “Karena web itu bisa dilihat oleh semua orang, seluruh Indonesia. Bahkan, dunia pun bisa melihat web kita. Web Kampung KB”, lanjutnya. Ia pun menjelaskan bahwa Kampung KB Desa Gunungsari di canangkan pada tanggal 27 Juli 2017.

Dalam kegiatan penancangan kampung KB MANGGIS (Mandiri, Tanggungjawab, Inovatif, Sejahtera), Desa Gunungsari berkolaborasi dengan lintas sektor diantaranya dengan Dinas Dukcapil yang melayani pembuatan akta kelahiran, Puskesmas dan BKKBN yang mengadakan pelayanan KB Implan secara gratis dan kelas balita dan lembaga-lembaga desa lainnya yang saling bersinergi. Secara umum, menurut Faiza, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) serta melalui program pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil

berkualitas. Sementara itu, Kepala Desa Gunungsari, Sudadi turut mengucapkan terima kasih kepada Pj TP-PKK Kabupaten Pati bersama Dinas Sosial P3AKB serta TP-PKK Kecamatan Tlogowungu yang telah berkenan hadir dalam sosialisasi dan edukasi Program Kampung Keluarga Berkualitas, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Wisata Gunungsari. Menurutnya, letak geografis Desa Gunungsari yang berada di ujung Kecamatan Tlogowungu dan langsung berbatasan dengan hutan ini, memiliki keindahan alam yang luar biasa, sehingga ia berterima kasih kepada Pj Bupati Pati yang telah mengesahkan Desa Gunungsari ini menjadi Desa Wisata. “Alhamdulillah pada tanggal 15 Juli kemarin ditetapkan oleh bapak Pj Bupati sebagai Desa Wisata”, ungkap Kades Gunungsari.

Dengan rintisan dan predikat inilah, pihaknya berharap nantinya Desa Gunungsari ini semakin maju dan berkembang seperti yang dicita-citakan bersama. Usai memberikan edukasi di Balai Desa Gunungsari, Faiza Henggar bersama rombongan mengunjungi warga Dusun Pongan Desa Gunungsari yang memiliki balita dengan gangguan pertumbuhan (stunted). Faiza pun lantas memberikan bantuan berupa makanan pemenuhan gizi untuk balita tersebut. Ia berpesan kepada orang tua balita agar selalu berkomunikasi aktif dengan bidan desa ataupun kader desa setempat untuk memantau perkembangan kesehatan anaknya.

Jelang Hari Jadi Pati, Digelar Sarasehan Budaya Jalur Rempah

Pati – Cakranusantara.net | Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-701 Kabupaten Pati dan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan

Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pati menggelar Sarasehan Budaya Jalur Rempah Pati sebagai bagian dari “Wangi Pradesa” Festival Rempah dan Budaya Pati Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati, (25/7).

Hadir dalam acara tersebut Penjabat Bupati Pati, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, OPD terkait, pelaku budaya Jalur Rempah Kabupaten Pati, serta narasumber dari Balai Pelestarian Kebudayaan.

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menekankan pentingnya melestarikan dan mengembangkan potensi budaya Jalur Rempah. Ia mengatakan Jalur Rempah bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pati.

“Melalui sarasehan ini, kita bersama-sama mengevaluasi dan memperkuat upaya strategis dalam pengembangan dan



pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan Jalur Rempah,” ujar Pj Bupati.

Hasil dari sarasehan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk mengakselerasi rekonstruksi Jalur Rempah di Kabupaten Pati. Rekomendasi ini akan menjadi panduan bagi semua pihak terkait untuk menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi budaya secara berkelanjutan dan berkeadilan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa tujuan utama dari sarasehan ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi kemajuan kebudayaan terkait Jalur Rempah di Kabupaten Pati, serta membangun sinergitas antar berbagai pihak dalam upaya memajukan budaya daerah.



SEGENAP REDAKSI
MENGUCAPKAN

Dirgahayu Republik
INDONESIA

 **NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU**

   CAKRANUSANTARA  CAKRANUSANTARA.NET

GG MUSIC
GELA GELD MASSEH



**DIRGAHAYU REPUBLIK
INDONESIA**

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2024

PERUMDA AIR MINUM
TIRTA BENING
KABUPATEN PATI

Mengucapkan
**DIRGAHAYU REPUBLIK
INDONESIA**

 **BAMBANG SOEMANTRI, S.Kom.**
Direktur Utama

 **I GEĐE SUARDANA, S.E.**
Direktur Teknik

**79TH DIRGAHAYU
INDONESIA**

17 Agustus 1945 17 Agustus 2024

Keluarga Besar
MTS N 3 Pati

Mengucapkan
**DIRGAHAYU
INDONESIA**

Ke 79th

 **WAHYU HIDAYAT, S.Pd, M.Si**
Kepala Sekolah

**79TH DIRGAHAYU
INDONESIA**

**79TH DIRGAHAYU
INDONESIA**

Keluarga Besar
MTS N 1 PATI

 **H. ALI MUSYAFAK, S.Ag, M.Pd.I**
KEPALA SEKOLAH

Mengucapkan
**DIRGAHAYU REPUBLIK
INDONESIA**

79TH

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2024

Joko Mulyono Pertanyakan Kejelasan Kasus Pungli SDN Bogorame



Cakranusantara.net, Rembang | Setelah ramai diberitakan beberapa bulan yang lalu oleh media online soal dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum kepala

sekolah dan guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bogorame, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang.

Menurut Joko Mulyono, pelapor mengatakan, jika dengan jelas tertera dalam Kwitansi nominal Rp. 350 ribu berstempel SDN Bogorame. Kedatangannya ke Polres Rembang dalam rangka konfirmasi aduan perkara tindak pidana dugaan pungutan liar (pungli), yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah (Kepsek) dan guru.

“Saya ke Polres Rembang ini untuk mempertanyakan sekaligus meminta informasi kejelasan atau tindak lanjut atas pelaporan perkara yang pernah diajukan sejak 31/01/2024 Januari,” kata Mulyono.

Sementara, KBO Reskrim Polres Rembang, Iptu Widodo Prasetyo saat diwawancarai menyampaikan, bahwa dari penyidik telah melaksanakan langkah-langkah memanggil dan klarifikasi ke sejumlah pihak, mulai dari pelapor, saksi-saksi hingga terlapor. “Saya juga sudah koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan sampai saat ini masih mendalami dugaan pungutan liar (pungli),” terangnya.

Disinggung soal hasil dari inspektorat, menjawab bahwa masih di koordinasikan berkaitan dengan real di lapangan dan beberapa pihak sudah diundang untuk klarifikasi. “Proses masih berlanjut sampai saat ini,” tutupnya. Editor : Rohman

Bea Cukai Kudus : Tiga Pelaku Pengedar Pita Cukai Palsu Harus Berurusan Dengan Hukum



Cakranusantara.net, Pati | Pertama kali dalam 6 tahun terakhir, Bea Cukai Kudus bekerjasama dengan Kanwil Jawa Tengah, DIY serta Jawa Timur II membongkar jaringan peredaran pita cukai palsu, Kamis (8/8/2024).

Lenni Ika Wahyudiasti, Kepala Kantor Bea Cukai Kudus mengaku, bahwa pihaknya mendapatkan informasi itu berawal dari adanya pemasokan pita cukai palsu ke Jawa Timur (Jatim), Tim Gabungan yang terdiri dari Bea Cukai Kudus, Kanwil Jateng, DIY, serta Kanwil Jatim II yang melakukan giat operasi penindakan dengan menghentikan sebuah sarana pengangkut berupa mobil Pickup merek Mitsubishi tipe L300 warna hitam ber nomor polisi 8365 MK pada Rabu, 12 Juni 2024, pukul 00.15 WIB, di Jl Raya Pati-Kudus KM 4, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

“Hasil pemeriksaan, didalam mobil ditemukan 749 lembar pita cukai yang diduga palsu, disembunyikan di belakang kursi penumpang dan 10 karung tembakau dibagian belakang. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup inisial MN (57) ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan sopir AK (45) dan penumpang AS (46) sebagai saksi,” terang Ika.

Selanjutnya, Tim Gabungan melakukan pengembangan atas kasus tersebut, dari MN,

ia mendapatkan pita cukai dari M (52) yang beralamat di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

“Tersangka M sendiri menerangkan, bahwa pita cukai tersebut diperoleh dari tersangka K (47) yang tinggal di Desa Sembunharjo, Kecamatan Genuk Kota Semarang,” ujarnya.

Kegiatan membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, dan menyediakan untuk dijual pita cukai palsu telah melanggar hukum dan disangkakan Pasal 55 huruf b Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

“Untuk ancaman pidananya, yakni penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali lipat dari nilai cukai dan paling banyak 20 kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayarkan,” tegasnya. Potensi penerimaan negara tidak terpenuhi dari tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga tersangka tersebut adalah Nilai Cukai, PPN, dan Pajak Rokok yaitu mencapai sebesar Rp. 222.156.396,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). “Berkas Perkara ketiga tersangka, MN, M, dan K, telah dilakukan penelitian formil dan materiil oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, dinyatakan lengkap pada Selasa, 30 Juli 2024. Seluruh barang bukti dan tersangka dilimpahkan oleh Bea Cukai Kudus ke Kejari Pati pada Kamis, 8 Agustus 2024,” ungkap Ika.

“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Kejari Pati, atas perannya sebagai mentor penyidik Bea Cukai Kudus dalam memberikan petunjuk pengungkapan jaringan pita cukai palsu,” kata Lenni Ika Wahyudiasti, Kepala Kantor Bea Cukai Kudus dalam Konferensi Pers-nya di Aulia Kantor Kejari Pati, Kamis (8/8/2024).

Bea Cukai Kudus juga menyatakan komitmen untuk terus menekan peredaran rokok ilegal, baik yang tanpa dilekati pita cukai (rokok

bodong), atau yang pakai pita cukai palsu (pita cukainya tidak sesuai/ salah peruntukannya), maupun rokok yang dilekati pita cukai bekas,” lanjut Lenni.

Upaya preventif ini digelar mulai dari pemberian sosialisasi dengan berbagai metode dan media, pemasangan baliho, penyebaran pamflet dan stiker, hingga pemasangan iklan komersial tentang pemberantasan rokok ilegal. “Kegiatan penindakan dan operasi pasar, baik mandiri maupun gabungan, juga masif dilaksanakan sebagai wujud sinergi serta dukungan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) dalam pemberantasan rokok ilegal,” tambahnya.

Sampai dengan 31 Juli 2024 Bea Cukai Kudus telah melakukan 97 kali penindakan dalam upaya penegakan hukum dibidang cukai. Lebih dari 12 juta batang rokok ilegal senilai Rp. 16,64 miliar berhasil diamankan, dan potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi mencapai Rp. 11,6 miliar.

“Penerimaan negara sampai 3 Juli 2024, dari target tahun 2024 sebesar Rp. 44,4 triliun. Bea Cukai Kudus telah berhasil menghimpun Rp. 21,76 triliun atau 49,01 %. Secara Year-on-Year (YoY), realisasi penerimaan tersebut menunjukkan *growth* 16,60 % mengingat realisasi pada 31 Juli tahun sebelumnya Rp. 18,67 triliun,” Rincinya.

Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli, menjual, dan mendistribusikan rokok ilegal. Selain merugikan penerimaan negara dapat diancam dengan sanksi pidana, juga menimbulkan persaingan usaha menjadi tidak adil. Bahkan, efek sosialnya dapat mengganggu produksi rokok resmi yang akhirnya berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan menimbulkan pengangguran. “Segala informasi terkait peredaran rokok ilegal kiranya dapat disampaikan ke Bea Cukai Kudus, supaya segera ditindaklanjuti. Untuk menjalankan usaha rokok secara legal, segala informasi dan perizinan dapat diperoleh dan diurus di Kantor Bea Cukai tanpa dipungut biaya,” tandas Ika. Rohman

Desa Gunungsari Tlogowungu, Dicanangkan Sebagai Kampung KB “Manggis” RPPA

Cakranusantara.net, Pati | Desa Gunungsari Kecamatan Tlogowungu pada Rabu (7/8), dicanangkan sebagai Kampung KB “Manggis” Ramah Perempuan Peduli Anak (RPPA) oleh Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro.

Kegiatan yang berlangsung di Desa Gunungsari tersebut juga dihadiri oleh Faiza Mukti, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian ada pula Kepala DinsosP3AKB Kabupaten Pati, Camat Tlogowungu, Para Kepala OPD atau yang mewakili, serta para Kepala Desa beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Tlogowungu. Dalam pidatonya, Faiza memperkenalkan sebuah program unggulan yakni Getas Ranting. “Getas Ranting merupakan kampung keluarga berkualitas ramah perempuan, dan peduli anak, untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Jawa Tengah”, terang Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DP3AP2KB Provinsi Jateng dalam pidatonya. Dari 10 program prioritas Pj Gubernur Jawa Tengah, lanjut Faiza, diantaranya ialah penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penurunan angka pengangguran dan stunting. Diakuinya, dari hasil data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebanyak 20,8%. Kemudian dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 prevalensi stuntingnya sebanyak 20,7%. “Hal itu menunjukkan perlunya upaya-upaya dan strategi optimalisasi dalam menurunkan angka stunting. Dimana target capaian prevelensi stunting Jawa Tengah tahun 2024 ini sebesar 14%”, ungkap Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DP3AP2KB Provinsi Jateng. Sehingga, imbuhnya, masih diperlukan 6,7% untuk bisa mencapai target. Dan hal ini, menurut Faiza, bukanlah perkara yang mudah, sehingga salah satu upaya dan strategi yang pihaknya terapkan adalah dengan berinovasi melalui Getas Ranting.

“Intinya, ini adalah program pengintegrasian Kampung Keluarga Berkualitas dengan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dalam upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Tengah”, tuturnya. Getas Ranting, tegas Faiza, juga merupakan program sinergitas dan integrasi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan anak, dan keluarga sejahtera bebas stunting. Dalam pidatonya, ia pun menekankan pentingnya integrasi dan konvergensi program lintas sektor agar Kampung Keluarga Berkualitas dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dapat memberikan dampak nyata pada pemberdayaan keluarga, dengan mempertimbangkan perspektif gender dan hak-hak anak. “Kami berharap terwujudnya keterpaduan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pembangunan kualitas keluarga secara terpadu untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani dan rohani, berkarakter, dan produktif. Termasuk dalam mendukung percepatan penurunan stunting, pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG), pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan pekerja anak, serta perkawinan di bawah usia 18 tahun,” paparnya. Dalam kesempatan itu, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DP3AP2KB Provinsi Jateng juga memberikan bocoran terkait prevalensi stunting di Kabupaten Pati. “Untuk Kabupaten Pati prevalensi stunting mengalami penurunan 4,5% di tahun 2023 menjadi 18,5% dari tahun 2022 sebesar 23 dan harapannya pada tahun 2024 menjadi 14% sehingga dengan adanya pencanangan kampung KB ramah perempuan dan peduli anak di Desa Gunungsari, angka prevelensi dapat sesuai dengan target”, ungkapnya.



Pencanangan Getas Ranting ini, imbuh Faiza, diharapkan dapat diikuti oleh semua Desa/kelurahan di seluruh Kabupaten. “Adapun tujuan terbentuknya Getas Ranting ini ialah untuk menurunkan angka stunting, mencegah adanya perkawinan anak, meningkatkan ekonomi perempuan, meningkatkan kesadaran perlindungan terhadap anak, mencegah kekerasan perempuan, terwujudnya angka cakupan ber-KB yang tinggi,

serta untuk meningkatkan perilaku Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS”, jelasnya. Adapun harapan utamanya, sambung Faiza, ialah agar kampung keluarga berkualitas ramah perempuan, dan peduli anak, dapat menjadi sebuah program yang efektif guna menurunkan prevelensi stunting di Jawa Tengah.

Menanggapi pidato Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DP3AP2KB Provinsi Jateng tersebut, Pj Bupati, Henggar Budi Anggoro menyatakan kesiapan pihaknya untuk ikut berpartisipasi mendukung keberhasilan program kampung keluarga berkualitas ramah perempuan, dan peduli anak

tersebut.

Henggar pun berharap kolaborasi aktif dari seluruh elemen terkait, baik di tingkat daerah, kecamatan, desa, tokoh masyarakat, maupun mitra kerja lainnya. “Mudah-mudahan melalui strategi kolaboratif antara seluruh komponen terkait, kampung keluarga berkualitas ramah perempuan, dan peduli anak, di Kabupaten Pati dapat berjalan sukses demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah kondisi ideal yang kita harapkan bersama,” pungkasnya. **

Memanas, Gapoktan Desa Karangsari Cluwak Dengan KPPMK Hendak Duel

Pati, Cakranusantara.net | Kembali memanas, perkara lahan pertanian



di Desa Karangsari yang mengatas nama kelompok Gapoktan

dengan KPPMK sempat bersitegang di lokasi lahan pertanian, hingga nyaris berujung duel. Rabu 7 Agustus 2024.

Sangatlah disayangkan, problem ini masih tak kunjung usai, sehari sebelumnya sudah di adakan mediasi di Polsek Cluwak dan hampir semua Elemen terkait di undang dengan harapan dapat menemukan titik terang kebenaran, namun lagi-lagi kelompok Gapoktan tidak hadir lagi tanpa ada kejelasan. Edi Cahyono, Ketua KPPMK yang juga pemegang mandat kelola lahan pertanian dari PT RSA menyayangkan adanya kejadian ini, menurutnya jika ini di biarkan saja maka tidak akan ada selesainya, maka jalan satu-satunya kita tempuh upaya hukum.

“Untuk ini saya mesti ambil langkah hukum agar semuanya jelas siapa yang punya hak secara jelas, biarkan data dan bukti nanti yang berbicara,” tegasnya. Menurutnya, sekelompok Gapoktan tidak pernah ada mandat secara legal dari pihak PT pengelola namun bertindak melebihi pengelola yang sah, ditambah lagi informasi dari hasil diskusi kemarin dari pihak PT pengelola sampai hari ini tidak pernah ada memberikan mandat ke siapapun termasuk Gapoktan, justru jika Gapoktan berani aneh-aneh maka musuhnya PT TTW (Tjandi Tunggal Wedari).

Harapannya, perkara ini dapat secepatnya diselesaikan, agar secepatnya dapat kondusif baik penyewa dan yang menyewakan itu sesuai yang berhak, sehingga jelas semua dalam regulasinya. Tejo

Dandim Pati Melepas Prajurit Serta PNS Purna Tugas dan Pindah Satuan



Cakranusantara.net, Pati | Sebanyak 10 personel Kodim 0718/Pati dilepas Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos dalam acara Wisuda Purna Tugas dan Korp Raport Pindah satuan. Dandim berpesan kepada prajurit serta PNS Kodim Pati yang telah purna tugas agar segera beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan

lingkungan masyarakat tempat domisili masing-masing. Hal ini disampaikan pada saat acara yang di gelar di aula Makodim Pati, Kamis (08/08/2024). “Hari ini kita melepas lagi anggota yang telah berhasil melaksanakan pengabdian kepada Negara serta TNI Angkatan Darat sebagai Prajurit dan PNS,”kata Dandim. Dandim berharap untuk tetap menyambung tali silaturahmi dengan Kodim 0718/Pati. “Sampai kapanpun selama hayat masih dikandung badan. Kodim Pati adalah almamater kita khususnya bagi bapak-bapak yang sudah purna tugas. Karena di sini telah terukir sejarah pengabdian kita,” sambung Dandim. Selamat kepada anggota yang telah memasuki masa pensiun dan pindah satuan. Jaga diri dan keluarga masing-masing, karena ini kewajiban saya sebagai Komandan agar selalu mengingatkan untuk

kebaikan kepada seluruh anggota,” lanjutnya. “Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menyertai kita semua, agar selalu diberikan kebaikan, kesehatan serta umur panjang,” tandas Dandim.

Personel yang pindah satuan sebanyak 3 orang adalah Serka Mashuri Babinsa Koramil 09/Sukolilo sebagai Bintara Kodim 0717/Grobogan, Serda Kasturi Babinsa Koramil 02/Juwana sebagai Bintara Kodim 0721/Blora dan Serda Puguh Ari W. Bintara Kodim 0718/Pati pindah satuan ke Kodam XVI/Pattimura.

Sedangkan 7 personel yang wisuda purna tugas atau pensiun adalah Peltu Suwito, Serka Ngali, Serka Suwono, Serka Warsidi, Serka Sakiran, Kopka Haryono dan PNS Partono. **

Tinjau TMMD di Desa Tluwuk, Dandim Pati Apresiasi Perjuangan Anggota Dan Masyarakat

Cakranusantara.net, Pati | Meninjau langsung kondisi TMMD Sengkuyung tahap III Tahun 2024 di desa Tluwuk kecamatan Wedarijaksa, Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos sampaikan apresiasi kepada satgas TMMD beserta masyarakat desa setempat, Jumat (09/08/2024).

Hal ini disampaikan oleh Dandim Pati selaku Dansatgas TMMD Sengkuyung setelah melihat secara langsung kondisi di lapangan yang cukup berat karena dihadapkan dengan cuaca panas dalam pekerjaan betonisasi jalan di desa tersebut.

Untuk diketahui, betonisasi jalan sepanjang 497 meter ini adalah sasaran pokok TMMD Sengkuyung di desa Tluwuk merupakan jalan penghubung menuju hutan wisata mangrove serta jalan penghubung menuju area tambak.

“Setelah mengecek langsung pekerjaan yang dilaksanakan terutama pada sasaran pokok betonisasi jalan, saya sampaikan terimakasih serta apresiasi kepada seluruh anggota dan masyarakat yang telah bekerja terus-menerus meskipun di tengah cuaca panas,” ungkap Dandim.



“Untuk progres pekerjaan hingga hari ke-17 ini bagus, baik sasaran betonisasi jalan, Rehab Rumah Tidak Layak Huni serta kegiatan bersifat nonfisik berjalan sesuai rencana,” lanjut Dandim.

Secara umum, kata Dandim, untuk pelaksanaan TMMD di dua wilayah tidak ada kendala. Selanjutnya pihaknya juga akan mengagendakan pengecekan pelaksanaan TMMD di desa Payak kecamatan Cluwak.

Usai pengecekan di lokasi TMMD, Dandim Pati melanjutkan silaturahmi di kantor desa Tluwuk didampingi Danramil 07/Wedarijaksa, Perwira Seksi Teritorial, Camat Wedarijaksa serta Kepala Desa setempat. *

Dandim Pati Mendampingi Kunjungan Kerja Wamentan



Cakranusantara.net, Pati | Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia Sudaryono, B. ENG., M.M, MBA melaksanakan kunjungan kerja di wilayah kabupaten Pati Jawa Tengah. Kunjungan Wamentan di

Pati didampingi Aster Kasdam IV/Diponegoro Kolonel Inf Lukman Hakim, S.Si, M.Tr.(Han) bersama Dandim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos beserta Forkopimda Pati dan para pejabat terkait.Jumat,(02/08/2024).

Wamentan meninjau stasiun pompa Tambakromo yang berlokasi di desa Kedumulyo kecamatan Sukolilo kabupaten Pati, dimana di tempat tersebut terdapat 6 pompa besar dibangun tahun 1991 yang sudah termanfaatkan selama 2 tahun. “Pompa air ini lama tidak dimanfaatkan, dan difungsikan lagi tahun 2017. Ini sebetulnya sangat punya prospek. Dengan pompa nyala diharapkan bisa mengalir 1000 hektar lebih. Kalau bisa panen 3 kali berarti 3000 hektar penambahan areal tanam, tentu saja menjadi perhatian,” Wamen menambahkan, pihaknya sudah menginstruksikan kepala dinas di jajarannya agar dibuatkan RAB.

“Karena sudah ada koordinasi terkait debit air, sehingga debit air cukup sesuai dengan kesepakatan, air dipompa dan dimanfaatkan untuk petani 3 kecamatan di 10 desa,”jelas Wamen. “Kita sudah ada koordinasi di tingkat kabupaten. Tinggal nanti ada perbaikan sedikit, yang penting air mengalir sampai jauh dan bisa dimanfaatkan untuk petani kita,”tandas Wamentan. Sementara itu, ditemui di sela kegiatan Dandim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos, menyampaikan komitmennya mendukung penuh program ketahanan pangan nasional dengan mengerahkan seluruh potensi serta personel jajarannya yang tersebar di 21 Koramil. Pihaknya juga telah mendistribusikan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berupa mesin pompa air bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada kelompok tani yang membutuhkan. “Kami khususnya jajaran Kodim 0718/Pati sejauh ini telah mengerahkan segenap kemampuan serta personel untuk bersinergi bersama pihak terkait untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dengan sistem pompanisasi serta perluasan areal tanam untuk meningkatkan hasil panen tanaman pangan di wilayah kabupaten Pati,” kata Dandim. Mengakhiri agenda kunjungan kerja di wilayah kabupaten Pati, Wamentan RI juga berkunjung di Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Lingkungan Pertanian yang berlokasi di kecamatan Jaken. **

Irdam Diponegoro Bersama Tim Melaksanakan Pengawasan Audit Triwulan III di Kodim Pati



Pati – Cakranusantara.net | Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos menyambut kedatangan Inspektur Kodam (Irdam) IV/Diponegoro Brigadir Jenderal TNI Yudi Pranoto, S.H., M.M., beserta Tim Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka melaksanakan pengawasan audit kinerja triwulan III tahun anggaran 2024 di Kodim 0718/Pati. Selasa (16/07/2024).

Kedatangan tim pengawasan Irdam IV/Diponegoro merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kelancaran dan efektivitas kinerja administrasi staf di satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro. “Kami mengucapkan selamat datang kepada bapak Irdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Yudi Pranoto, S.H., M.M., Kolonel Inf Momon Nuryaman, S.E., Letkol Inf Jasman, S.Pd, Letkol Inf Sarjiyanto, S.E, Letkol Inf Suyadi, S.H., M.Sc., Letkol Inf Fredy Feregrina, S.H., M.Hi., yang telah berkenan hadir di Kodim 0718/Pati dalam rangka kegiatan Pengawasan Audit Kinerja,”kata Dandim. “Untuk itu, kepada Tim Pengawasan Audit Kinerja Irdam IV/Diponegoro, kami mohon

bimbingan dan arahan dari bapak Irdam serta para senior kami dari tim Irdam yang nantinya dapat dijadikan pedoman untuk kemajuan kami di Kodim 0718/Pati,”tandas Dandim.

Sementara itu, Irdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Yudi Pranoto, S.H., M.M. menyampaikan terimakasih atas sambutan Komandan Kodim Pati dan jajaran kepada tim Irdam IV/Diponegoro.

“Kedatangan tim Irdam IV/Diponegoro ini ke seluruh jajaran adalah untuk melaksanakan pengawasan audit kinerja di satuan Kodam IV/Diponegoro yang tujuannya agar apabila ada yang tidak sesuai kita adakan perbaikan,”kata Irdam.

Selama kunjungan tersebut, tim pengawasan audit kinerja Irdam IV/Diponegoro melaksanakan evaluasi terhadap sistem administrasi, kegiatan pengarsipan, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab staf di Kodim 0718/Pati untuk memastikan bahwa semua proses administrasi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh TNI-AD. (Pendim)

Makanan Dari PT Sejin Pati Ternyata Sudah Diteluri Lalat



Pati – Cakranusantara.net | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati hingga kini belum bisa memastikan faktor yang menyebabkan sebanyak 305 karyawan PT Sejin Pati mengalami keracunan massal setelah makan siang pada Selasa 16 Juli 2024. Kuat dugaan menjadi penyebab utama keracunan makanan.

Salah satu karyawan yang enggan disebut namanya mengungkapkan, jika makan siang yang disajikan pada saat itu ia menilai sangat tidak layak. Hal ini, bisa dibuktikan dengan foto menu makanan yang ditemukan telur lalat didalamnya.

Disamping itu, makanan yang diberikan juga diduga tidak memenuhi standar gizi. Sebab, jika dikalkulasikan harga makan siang yang disajikan kurang dari Rp 7 ribu.

Sehingga kuat dugaan ada kesalahan dalam pengelolaan makanan, serta permainan harga yang jauh dibawah standard dan kata layak.

“Kayaknya itu tidak sampai Rp 7 ribu, jadi ada indikasi makannya asal-asalan. Sehingga gizi yang ada di makanan Itu juga dipertanyakan. Kayaknya

juga ada permainan didalamnya. Saya rasa menu makanan itu tidak layak. Porsinya kecil sekali,” ungkapnya, Rabu 17 Juli 2024.

Disisi lain, praktisi hukum Slamet Widodo mengutuk keras peristiwa yang menyebabkan ratusan karyawan mengalami sakit perut, mual-mual, hingga dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Pati dan Kudus.

Pria yang akrab disapa Om Bob itu dengan tegas meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan, dan pengusaha catering yang memiliki kerjasama untuk menyajikan makan itu.

“Karena menyangkut tentang kesehatan, jika perusahaan hingga pemilik catering tidak bertanggungjawab harus diproses secara hukum. Sebab tentang kesejahteraan dan keselamatan para buruh,” pinta Om Bob.

Menurutnya, kasus ini harus ada titik temu. Sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari. Sebab, keberadaan perusahaan besar seperti Sejin, seharusnya bisa menjamin kesejahteraan dan kesehatan karyawan.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum konfirmasi kepihak penanggung jawab PT. Sejin Fashion Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Pati. Tejo



Perbankan, Agunan Bukan Atasnama Hak Milik Itu Tidak Sah

Pati – Cakranusantara.net | Secara umum dalam perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan orang yang menggunakan agunan milik orang lain itu tidak sah menurut hukum di Indonesia.

1. Prinsip kesetaraan (Paritas) berarti, seorang pihak tidak dapat menyerahkan sesuatu yang bukan miliknya sebagai jaminan. Dalam kasus ini, seseorang tidak memiliki hak atas agunan yang digunakan sebagai jaminan, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal :

1. 1440 KUHPerdara, bahwa jaminan harus berupa hak atas sesuatu yang dimiliki oleh peminjam atau pemberi jaminan. Dalam kasus ini, seseorang tidak memiliki hak atas agunan, sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat jaminan yang diatur dalam pasal 1440 KUHPerdara.

2. Pasal 1423 KUHPerdara bahwa penggunaan sesuatu yang bukan milik sendiri sebagai jaminan tanpa izin dari pemiliknya dapat dipertanyakan. Dalam kasus ini, seseorang menggunakan agunan milik orang lain sebagai jaminan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga perjanjian tersebut dapat dipertanyakan.

3. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal. Dalam kasus ini, syarat kesepakatan dan sebab yang halal tidak terpenuhi, karena menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin berarti ada unsur ketidakjujuran dan melanggar hukum.

Penggunaan sertifikat milik orang lain tanpa izin, yang digunakan sebagai jaminan pinjaman juga dapat dikenai sanksi pidana. Ada beberapa undang-undang yang mengatur hal ini, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait perbankan dan kredit :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggunaan sertifikat milik orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan atau penipuan. Pasal-pasal yang relevan meliputi :

a. Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-

olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

a. Pasal 266 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat yang isinya dipalsukan, atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

b. Undang-Undang Perbankan juga memiliki ketentuan mengenai tindakan yang dapat dikenakan sanksi terhadap bank dan pihak terkait dalam hal pelanggaran ketentuan perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank harus melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pelanggaran terhadap prinsip ini bisa dikenakan sanksi administratif maupun pidana, tergantung dari jenis pelanggaranannya.

c. Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah juga mengatur tentang jaminan utang yang menggunakan sertifikat tanah. Penggunaan sertifikat tanah milik orang lain tanpa izin bisa dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan berpotensi dikenakan sanksi pidana.

Sanksi Bagi Debitur dan Bank

a. Debitur, Jika terbukti debitur menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin, debitur dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan KUHP, baik untuk pemalsuan maupun penipuan.

b. Bank, Jika bank terbukti terlibat atau lalai dalam verifikasi sertifikat yang digunakan sebagai jaminan, bank dapat dikenakan sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dalam kasus tertentu, pejabat bank dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti terlibat secara aktif dalam tindak pidana tersebut. Perjanjian pinjam meminjam antara bank dan seseorang yang menggunakan **sertifikat orang lain sebagai jaminan tanpa izin dari pemilik sertifikat tidak sah** berdasarkan hukum di Indonesia. Terdapat beberapa alasan hukum yang mendasari ketidakabsahan perjanjian tersebut :

1. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 KUH Perdata: Menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Suatu hal tertentu Suatu sebab yang halal Dalam kasus ini, syarat kesepakatan dan sebab yang halal tidak terpenuhi, karena



menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin berarti ada unsur ketidakjujuran dan melanggar hukum.

2. Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini, bank harus memastikan bahwa jaminan yang digunakan sah dan tidak bermasalah hukum. Jika bank menerima sertifikat milik orang lain tanpa izin pemiliknya, bank telah melanggar prinsip kehati-hatian ini.

3. Hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah: Mengatur bahwa untuk penjaminan dengan hak tanggungan, diperlukan persetujuan dari pemilik tanah atau benda yang dijamin. Tanpa izin pemilik, penggunaan sertifikat tersebut sebagai jaminan tidak sah.

Dampak Ketidakabsahan Perjanjian Tidak Mengikat Secara Hukum:

- Perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan sertifikat orang lain tanpa izin pemiliknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini berarti, baik bank maupun debitur tidak bisa menuntut hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut.
- Potensi Gugatan: Pemilik sertifikat yang sah bisa menggugat perjanjian tersebut dan meminta pembatalan perjanjian serta pengembalian sertifikat. Pemilik juga bisa menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penggunaan sertifikatnya tanpa izin. Sanksi Hukum selain ketidakabsahan perjanjian, tindakan menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin juga bisa dikenakan sanksi pidana.

Seperti tindak pidana pemalsuan dan penipuan adalah pelanggaran serius yang dapat berujung pada hukuman penjara bagi pihak yang terbukti bersalah. Dengan demikian, perjanjian pinjam meminjam antara bank dan seseorang yang menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin tidak sah berdasarkan hukum di Indonesia. Bank dan debitur harus memastikan bahwa semua dokumen jaminan yang digunakan dalam perjanjian adalah sah dan telah mendapatkan izin dari pemilik yang sah.

Bocornya Data Nasional, Dr Kurnia Zakaria : Jalani Proses Hukum Jangan Bodohi Publik



Jakarta – **Cakranusantara.net**

| Kasus peretasan sebelumnya terdapat 10 miliar kata sandi (password) telah bocor secara online di file “rockyou2024.txt” yang dikenal sebagai situs web peretas. Kumpulan kata sandi yang sangat banyak ini memudahkan peretas memecahkan kata sandi pengguna email dan website instansi/ lembaga/

institusi pemerintah dengan menggunakan metode “serangan brutal force” menebak kombinasi huruf dan angka yang dibuat konsumen/ pembuat akun.

Untuk keamanan para pemegang akun email dan aplikasi media sosial harus ubah kata sandinya. Juga ditambah dengan kunci tambahan dengan dua otentikasi factor (2FA). 2FA akan memberikan kode khusus ke ponsel untuk keamanan pribadi sebagai verifikasi masuk. Cara lain adalah menggunakan password manager atau pengelola kata sandi yang berfungsi sebagai “brankas” super aman untuk semua kata sandi pribadi.

Hasil peretasan ini ada 330 juta data milik Kemendagri berisikan data penduduk Indonesia dimana dapat diketahui NIK, Nama Lengkap, Alamat, Pekerjaan, Agama, NPWP, Nama Orang tua (ayah-ibu), NIK orang tua serta No. telepon dan no ponsel dari info yang beredar di media sosial disebarkan melalui akun medsos @anggoro anggamukti.

Peretasan Data dulu memakai sistem scamming atau penipuan online lintas negara, salah satu sindikat yang dikendalikan ZS alias Colby berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang ternyata kewarganegaraan RRC (Tiongkok) yang mempunyai anak buah 17 warga Indonesia (WNI), 10 WNA Thailand, 21 warga RRC, dan 20 WNA India dimana Dirtipid Siber Bareksrim Mabes Polri menangkap NSS yang melakukan penerjemah scamming TKI dibantu M sebagai penyalur PJTKI. Pimpinan Sindikat ZS telah ditangkap oleh NCB Interpol di Abu Dhabi dengan barang bukti hasil kejahatan yang disita saja 1,5 triliun rupiah. Aplikasi Depok Single Windows (DSW) diretas hackers “Garuda Security X Masyarakat Indonesia” pada 14 Juli 2024 dimana aplikasi ini lalai melindungi data aplikasi masyarakat milik Pemda Kota Depok, di mana Hackers dianggap kriminal bukan mitra kerja menemukan kelemahan website pemerintah

Banyak negara memback-up data tapi ternyata PDN 1 Serpong dan PDN 2 Surabaya dan PDN 3 Batam tidak mengijinkan 282 Instansi Kementerian dan Lembaga (K/L) Negara Melarang Back Up Serangan malware atau ransomware lockbit 3.0 menyebabkan PSDN 2 Surabaya diretas mengakibatkan 239 data Kementerian/ Lembaga serta ratusan daerah Pemda Indonesia berdampak.

Data ini, menurut Kurnia Zakaria sangat aneh, karena Menteri Komunikasi dan Informasi menganggap persoalan ini mudah ditanggulangi tapi sejak 20 Juni 2024 PSDN 2 belum bisa diambil alih masih dikuasai “Hacker Brain Chiper” hingga 3 Juli 2024 memberi kunci buka blokir, apa yakin data yang sudah diambil alih tidak di back-up hacker dan dijual demi keuntungan dan “penjajahan model baru kapitalis”. Beberapa permasalahan yang terjadi, mahasiswa kesulitan mengakses beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP-Kuliah) tahun 2024 sebanyak 853.393 orang peserta KIP-Kuliah untuk mengakses laman <https://KIPKuliah.kemendikbud.go.id>.

“Kemungkinan berakibat pada PPDB SD-SMA juga SNBP dan SNBT PTN (d/h SNMPTN dan SBMPTN UTBK) tahun 2024. Kemendikbud Ristek mengalami 47 aplikasi pelayanan Kemendikbud Ristek tidak dapat diakses publik. PSDN 3 Batam juga mengalami dampaknya sehingga pelayanan publik dilakukan manual. Aplikasi Srikandi milik pemerintahan Kota Surakarta, Jawa Tengah tidak dapat melayani publik. Aplikasi milik Muhammadiyah pun

terpaksa berhenti, pelayanan publik dunia pendidikan, dunia pelayanan umat dan sosial Muhammadiyah lumpuh,” terangnya.

Ditjen Imigrasi Kemenkumham Bandar udara juga mati, hingga dilakukan secara manual membuat Jadwal penerbangan berubah. Kementerian Keuangan dalam pelayanan publik NPWP WNA mati. Sebetulnya upaya peretasan PSDN 2 sudah ada upaya para ahli IT mengingatkan Pemerintah karena memantau adanya upaya penonaktif fitur keamanan Windows Defender PSDN 2 sejak 17 Juni 2024. Dunia digital Indonesia hampir sebulan belum pulih secara awal, data awal para pemakai aplikasi diwajibkan mengisi data ulang, dimana tanggung jawab Pemerintah pengelola Data Pribadi rakyat. Sebaiknya upaya digitalisasi ditunda saja daripada hanya menambah proyek anggaran APBN. Tidak semua mata meleak teknologi dan pelayanan listrik juga belum merata dan menambah utang negara yang sudah mendekati 2.500 triliun rupiah.

“Seharusnya Indonesia belajar dari Thailand memakai strategi EGA (*e-government agency*) dengan cara menyewa (*outsource*) ke perusahaan profesional dan berpengalaman. Kontraktor swasta yang menyediakan infrastruktur dan sumber daya penyedia cloud swasta nasional. Dimana bertugas, secara terpisah daerah kerjanya menciptakan Regulasi dan SOP yang sama sehingga ketidakmampuan ahli IT yang direkrut dimana Menteri Kominfo menurut Kurnia Zakaria tidak punya latar belakang skill IT sehingga tidak menguasai tugas kementerian yang sebenarnya, hanya “bagi-bagi kekuasaan” sebagai balas budi jurkam Jokowi dan Ketua Ormas PROJO,” ungkapnya.

Sebelumnya, bekerjasama dengan Belgia yang terkenal data nasional yang paling aman sedunia. 3 Juli 2024 jam 20.50 WIB Brain Chiper membagikan link aplikasi Decryptor ke PDNS 2 Surabaya dalam akun X (twitter) @stealthmole. Hacker membagikan karena bersifat independen atau kasihan pada masyarakat Indonesia yang mengalami dampaknya, Imigrasi tidak bisa memakai sistem online, PPDB daerah Jawa Timur dan Indonesia Timur terganggu, bocornya data Disdukcapil Daerah Indonesia Timur, belum lagi menimpa operasional Pemda dan BUMN. Buktinya lemah sistem Digitalisasi Data dan Pengisian Formulir Perizinan dan data administrasi Pemerintah menjaga Perlindungan Data Pribadi Warganegara.

“Sebaiknya Presiden mengangkat menteri harus berdasarkan keahlian. Kompetensi, dan jiwa bertanggungjawab bukan “bagi-bagi jabatan atau take away”. Pasalnya Menteri Kominfo selalu berlatar belakang partai politik dan “jurkam” sangat dinilai dibawah standar keahlian dalam Komunikasi dan Informatika serta tidak dianggap mempunyai wawasan teknologi digital. Peretasan PSDN 2 belum selesai dimana Pemerintah “gagal angkat data yang hilang” 19 Juli 2024 terjadi “Pemadaman Teknologi Microsoft” yang menimpa pemakai teknologi Windows Microsoft dimana sistem pengendalian Satelit nya yang diretas hackers,” lanjutnya.

Beberapa Maskapai penerbangan terganggu jadwal penerbangannya dan boarding penumpang. Data yang diambil hackers dapat disalahgunakan pihak ketiga untuk judi online. “money game, pinjaman online sehingga merugikan pemilik data pribadi. Tim gabungan Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kemenkominfo, Menko Polhukam, Polri, BIN, Bais TNI, dan PT Telkom Tbk. (Persero) masih belum memulihkan data yang hilang hingga sekarang hanya bisa memulihkan sistem bisa dipakai lagi.

“Pelayanan Publik sendiri mempunyai aplikasi yang berbeda-beda, sedangkan NIK menjadi dasar untuk bisa mengakses aplikasi melalui HP maupun Laptop/ Notebook/ Komputerisasi. Dalam UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sesuai Pelanggaran Pasal 47 adanya SanKsi Administrasi sesuai pasal 56 ayat (2) dan (3) UU No. 27/2022 dan sanksi Pidana sesuai pasal 70-72 UU No.27/2022. Artinya jangan disalahkan petugas pelaksana lapangan, tapi yang membuat Regulasi setingkat Menteri harus bertanggung jawab dan Presiden harus melakukan upaya Perlindungan Data Bangsa negara, seharusnya memberi Kompensasi dan berani bertindak untuk para pembantunya maupun dirinya sendiri karena lalai menjaga keamanan data warganya dan mengkhianati kepercayaan rakyat. Jangan mengincar pelaku peretasan karena mungkin Hackers bermaksud baik memberitahukan adanya kelemahan perlindungan data publik terhadap aplikasi-aplikasi yang dimiliki Kementerian dan Lembaga serta Pemerintahan daerah. Hackers harus dibedakan Hitam Putihnya jika ada itikad jahatnya untuk memanfaatkan demi kepentingan sendiri maupun alasan ekonomis atau perang dunia maya antar negara “tukar menukar data intelijen/ rahasia negara’ psywar dunia. Jadi harus diperkuat kemampuan siber dan keamanan siber BSSN. Karier BSSN bukan ‘parkir pejabat pintar” tapi kemampuan skill It-nya yang mumpuni dan latar belakang pendidikan IT. Jangan sampai AI yang mengambilalih kendali rakyat dan negara. AI digunakan untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 Bebas Utang dan Berdikari bebas dari Negara kapitalis dan Sosialisme Kapital. Jangan memakai Pejabat Negara hasil Karbitan, tapi tahu apa yang harus dilakukan dan berani mengambil kebijakan atas kepentingan Rakyat,” tandasnya. Editor : Rohman

Kasus Tipikor dan TPPU APBD 4.407 Trilyun Oleh PT Asuransi Bangun Askrida



Cakranusantara.net,
Jakarta | PT Asuransi Bangun Askrida (ABA) yang didirikan sejak 2 Desember 1989 dari semangat patungan beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Dana Pensiunan BPD, menyettor modal dasar sebesar 60,61 Persen (%) saham, dan beberapa Pemerintahan Daerah

(Pemda) Provinsi menyettor modal dasar sebesar 39,39 % saham dengan modal dasar PT sebesar 400 miliar rupiah.

Mendirikan perusahaan jasa asuransi kontruksi untuk tujuan memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko dan kerugian yang diperuntukkan bagi bangunan/ gedung dari properti

Pemda. Mendapatkan ijin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. JEP.192/KM.13/1990 tertanggal 14 Maret 1990. Tahun 1996 Askrida memperluas saham perusahaan untuk 27 Pemda Provinsi. Tahun 2007 Askrida memperluas usaha asuransi bangunan syariah dan asuransi kendaraan bermotor dinas Pemda syariah.

Tahun 2011-2012 memperluas bidang usaha asuransi kesehatan, asuransi kredit BPD, dan asuransi oil dan gas, berkantor pusat di Jalan Pramuka Kav 151 Pulogadung Jakarta Timur. Pemegang saham terbesar mayoritas Askrida adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbang) sebesar 16,31 % saham, Dana Pensiun PT BPD Jawa Barat (Jabar) dan Banten (Dapen Bank BJB) sebesar 12,76 %) dan PT. BPD Jawa Barat & Banten (BANK BJB) (9,45 %). Dan saham terkecil minoritas Pemerintahan Provinsi Papua (0,01%).

Dewan Komisaris Askrida Tahun 2018-2022 adalah Komisaris Utama Efa Yonnedi (Jopang 2 Mei 1972) lulusan Universitas Andalas (1985), Magister Monash University Australia (2002) dan Doctoral University of Manchester United Kingdom (2007) sejak RUPS Askrida Tahun 2018. Mantan Dewan Komisaris BANK NAGARI atau BPD Sumatera Barat (2011-2018) dan dosen, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang (1996-2017). Komisaris Independen Askrida sejak RUPS Tahun 2019 Muchlis Hasyim Yahya (Surabaya 25 Mei 1964) lulusan BBA New York Institute of Technology Amerika Serikat (1999) sebelumnya Komisaris Utama PT Praba Arta Buana Utama (sejak 2018), wirausaha humas/ motivator (1999-2015) dan Komisaris PT Interlink Nusa Niaga (sejak 2015).

Selain itu, Komisaris Independen Askrida sejak 21 Juni 2022 Hadi Susanto (Banda Aceh, 29 Juli 1958) lulusan Universitas Sumatera Utara (1988) mantan staf karyawan hingga Direktur Utama Dana Pensiunan Pegawai BANK SUMUT atau BPD Sumatera Utara (1982-2021). Komisaris Independen Askrida lainnya Didik Supriyanto (Tuban, 8 Juli 1966) sejak RPUS tahun 2018. Lulusan Universitas Gajah Mada Yogya (1986) dan Magister dari FISIP UI (2007). Mantan Dirut PT Sarana GSS Trembul (2016-2017), Pimpred PT Kapan Lagi.Networks (2011-2016), Direktur PT Detik Koran Cepat (2002-2005), Wapimpred PT Agranet Multicitra Siberkom (2000-2011), Redaktur Pelaksana Tabloid ADIL PT. Abdi Bangsa Group (1997-1999). Dewan Komisaris dibantu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

“Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama (Dirut) Askrida sejak 25 Juni 2020 Nonot Haryoto (Karanganyar, 10 Juli 1972) berkariir sejak awal di Askrida mulai tahun 2008 sebelumnya di Kementerian Keuangan (1994-2008). Direktur Kepatuhan Askrida sejak 17 Mei 2019 Hendro Friendiyanto (Jakarta, 24 September 1968) lulusan STIE Dwipa Kencana Jakarta (2015) mulai berkariir di Askrida sejak 1996 hingga menjadi Dirut Dana Pensiun Askrida sejak 2018. Direktur Teknik Askrida sejak 17 Mei 2019 Abdul Mulki (Padang, 20 November 1973) lulusan Universitas Andalas Padang (1996) berkariir di Askrida sejak 2017. Sebelumnya di PT Reasuransi Indonesia (1999-2012) dan Wicaksana Overseas International Holding Company (1997-1999). Direktur Pemasaran Askrida Bunyamin (Jakarta 12 Juni 1969) sejak 25 Juni 2020 dan berkariir di Askrida sejak 1991. Direktur Operasional Askrida sejak 25 Juni 2020 Wawan Mulyawan (Kuningan 24 Juli 1964). Sebelumnya berkariir di BPD Jawa Barat & Banten (BANK BJB) sejak tahun 2011”.

Dalam Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi PT ABA diduga mengalami kerugian negara sebesar 4.405 triliun rupiah periode tahun 2018-2022, dimana ada dugaan penerimaan uang komisi atau fee (deviden/ pembagian keuntungan saham) yang diterima oleh Gubernur DKI Jakarta AB sebesar 400 miliar rupiah dengan perhitungan saham 5,5 % milik BPD DKI Jakarta (Bank DKI) dan saham 4,1 % milik Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah GP sebesar 500 miliar rupiah, diterima Gubernur Jawa Barat RK sebesar 800 miliar rupiah dengan perhitungan saham 13 % milik Dana Pensiunan PT BPD Jabar dan Banten (Dapen Bank BJB) serta saham 9,6 % milik PT BPD Jabar Banten (Bank BJB), diterima Gubernur Sumatera Barat M sebesar 400 miliar rupiah dengan perhitungan saham 15,6 % saham milik Pemprov Sumatera Barat dan saham 7,9% milik Dana Pensiunan PT BPD Sumbar (Bank NAGARI).

KPK telah melakukan pemeriksaan atas dugaan tertuduh dari Askrida MH dan EY dan sempat menghentikan penyelidikan serta pemeriksaan dengan alasan Pemilu 2024 (Pilpres dan Pileg) pada 14 Februari 2024 lalu sejak 2023.

Tahun 2023 RUPS memilih dan mengangkat Dewan Komisaris PT Askrida Rinaldi, Didik Supriyanto, Herry Yanson, Prakoso Budi Wibowo, dan Hadi Susanto. Sedangkan Dewan Direksi Henry Ananda Siregar, Suryadi Apriyanto, dan Mohammad Sjafril Lawado.

Dalam Laporan keuangan audit ternyata Utang Askrida mempunyai utang pada Bank Mandiri sebesar 1,5 triliun rupiah dan Taspen Bank Mandiri sebesar 800 miliar rupiah. Pada

- Tahun 2018 deviden yang dibagikan Rp. 849.726.000.000,- sedangkan laba PT hanya Rp. 162.185.000.000,- artinya ada defisit minus Rp. 687.541.000.000,-.
- Tahun 2019 deviden yang dibagikan Rp. 819.751.000.000,- sedangkan laba PT hanya Rp. 79.913.000.000,- artinya defisit minus Rp. 739.838.000.000,-.
- Tahun 2020 deviden yang dibagikan Rp. 718.281.000.000,- sedangkan laba PT Rp. 75.949.000.000,- artinya defisit minus Rp. 642.332.000.000,-.
- Tahun 2021 deviden yang dibagikan Rp. 941.590.000.000,- sedangkan laba PT hanya Rp. 74.899.000.000,- artinya defisit minus Rp. 866.691.000.000,-.
- Tahun 2022 deviden yang dibagikan Rp. 1.075.714.000.000,- sedangkan laba PT hanya Rp. 93.846.000.000,- artinya defisit minus Rp. 981.868.000.000,-.

Hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria, menurutnya manajemen PT. Asuransi Bangun Askrida disinyalir telah melakukan kegagalan dalam tata kelola yang penuh penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan wewenang serta ketidak hati-hatian dalam manajemen risiko perusahaan serta ada dugaan gratifikasi dan sumbangan kampanye Pilpres 2024 yang lalu, dan Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

Permasalahan lainnya :

1. Investasi uang nasabah asuransi digunakan dalam perusahaan bermasalah dan berafiliasi dengan manajemen dan pemegang saham seperti PT. Mahanusa Graha Persada,
2. Permasalahan keuangan yang defisit serta perusahaan tidak bisa membayar rasio klaim dan rasio beban usaha Askrida, artinya ada kemungkinan gagal bayar tagihan.
3. Penurunan peringkat hasil resiko underwriting,
4. Ketidakmampuan rasio likuiditas
5. Ketidakseimbangan angka ROE dan ROA
6. Beban klaim retensi lebih besar 88,32% dari aset dan modal PT
7. Beban Reasuransi lebih besar dari 11,68% dari aset dan modal PT
8. Tagihan klaim lebih besar dari setoran premi
9. Pembagian deviden (komisi pemegang saham) lebih besar daripada penerimaan laba,

10. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tanpa RUPS tapi memori Direktur saja RKAP Askrida Tahun 2022 dari Rp. 4.233.970.000.000,- menjadi Rp. 4.675.000.000.000,- (adanya penambahan Rp.441.030.000.000,-).
11. Pembebanan revisi premi tanpa aturan
12. Direksi mengambil keputusan tanpa persetujuan RUPS tentang Perjanjian Kredit (pinjaman) dengan Bank Mandiri sebesar 2,3 triliun rupiah.

Biasanya kejahatan timbul karena dorongan individu untuk memiliki sesuatu yang berharga, apalagi manusia terhadap benda keinginan kemewahan dan kekuasaan tidak akan pernah terpuaskan hingga bisa melebihi orang lain. Sehingga dengan sengaja dan sembunyi-sembunyi akan melakukan pelanggaran hukum, sedangkan demi kekuasaan seorang pejabat dengan terpaksa menuruti keinginan atasan daripada jabatan hilang.

“Permainan laporan keuangan dan kondisi keuangan perusahaan sudah biasa, toh bukan uang milik sendiri. Rugi sedikit yang penting kekuasaan langgeng dan penghasilan diluar gaji semakin besar, anggap saja harus “*berbagi jatah*” demi keamanan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Apalagi kalau bisa menutup mulut dan menutup mulut serta telinga oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak berwenang lainnya sudah pasti dijamin aman,” ungkap Kurnia.

Regulasi bisa diatur demi kepentingan merampok uang negara secara bersama-sama. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bisa diisi tanpa kejujuran, yang penting membuat laporan, dan bila ada penambahan harta bergerak maupun tidak umumnya diisi dengan asal mula harta dari “Warisan” atau “Hibah” yang tidak perlu ada pembuktian dokumen pendukung. Kejahatan dilakukan untuk meraih kemakmuran secara instan dan mudah.

“Kejahatan Penggelapan jabatan pejabat perusahaan maupun instansi pemerintah karena mempunyai status sosial ekonomi tinggi. Mungkin sangat sulit menemukan Pejabat Jujur dan Bersih. Dorongan tuntutan Istri dan Anak juga menyebabkan para oknum Pejabat menjadi Gelap Mata untuk melakukan korupsi serta “Kebiasaan”, yang tadinya korupsi sekala kecil-kecilan yang ditoleransi akhirnya jadi makin membesar dan demi prestise jabatan, yang penting mau berbagi jatah pada oknum Aparat Penegak Hukum juga dengan kepentingan politis demi meraih jabatan yang lebih tinggi lagi dan langgeng,” ujarnya.

Hasil kejahatan dapat dialihkan namakan atau dialihfungsikan, yang penting dimata masyarakat tampak bersih dan mencerminkan tindakan yang mengatas namakan kepentingan rakyat dan pegawai kelas bawah. Percuma jujur dalam hidup sederhana atau tetap miskin dan sengsara seumur hidup, kebahagiaan biasanya diukur dengan kekayaan serta prestise. Dugaan korupsi Top Manajemen Askrida bukan semata-mata untuk pemegang saham mayoritas tetapi demi sumbangan kepentingan politis semata. Apalagi Askrida bukan BUMN maupun BUMD tetapi perusahaan swasta yang dananya berasal dari APBD dan masyarakat sendiri.

“Biasanya Top manajemen melihat ada uang banyak yang bersifat ‘nganggur’ menjadi punya niat buruk memanfaatkan dimana nasabah membayar premi secara rutin, akan tetapi belum tentu habis masa kontrak tidak mengajukan klaim kerugian, artinya Perusahaan Asuransi mendapatkan Modal Gratis dari Nasabah. Disini kita harus pertanyakan dimana efisien dan efektif

adanya Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dibawah koordinator Dewan Komisaris serta Pembiaran Dewan Komisaris terhadap pelanggaran yang dilakukan Dewan Direksi serta keanehan RUPS Askrida, dimana pembagian deviden (komisi) saham lebih besar daripada laba perusahaan,” tegasnya.

KPK jangan hanya memeriksa pejabat Askrida yang menyerahkan uang saja tetapi juga para penerima, apakah menerima sebagai Kepala Daerah Provinsi atau atas nama Pemegang Saham atau atas nama pribadi. Ingat tidak ada makan siang gratis, sesuai janji kampanye Prabowo Gibran saja berubah jadi Sarapan Bergizi Anak Sekolah, dimana anggaran Rp. 15.000,-/hari menjadi Rp. 7.500,-/hari. Artinya jajanan bersifat “mengenyangkan dan bergizi” tidak cukup dengan Makan Snack (minuman mineral gelas ditambah satu lontong dan satu bakwan/ tahu/ tempe goreng ?? Sehat tidak sakit dikemudian hari sudah jelas.

“KPK Harus berani periksa para Komisaris, Direksi serta Manager/ Kepala

Bidang Askrida yang menjabat saat periode tahun 2017 hingga 2023 yang namanya sudah disebut diatas, demi bisa memulihkan kepercayaan Masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak hanya tebang pilih. Juga para Auditor Akuntan Publik serta Notaris pun harus diperiksa dalam waktu segera, kemudian segera tetapkan tersangkanya dalam waktu singkat, jangan ditunda-tunda nanti terburu rakyat lebih fokus menikmati efek domino Film “Vina sebelum 7 hari” dan melupakan keterlambatan pembangunan IKN dan menghidupkan kembali pola KKN dalam Pemerintahan Pusat maupun Daerah serta memunculkan DPA tanpa referendum UUD Tahun 1945,” harap Kurnia.

“Jangan lagi terjadi, Rakyat ‘Turun Jalan’ seperti Tahun 1966 dan 1998. Jangan KPK malah dituntut direformasi karena peminat Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK baru saja masyarakat Intelektual tidak berminat dan sepi ikut seleksi Capim Komisioner KK dan Dewas KPK sendiri,” pungkas Kurnia. Editor : Rohman

Penimbunan Solar Bersubsidi Diduga Milik Oknum Sekdes

Pati – Cakranusantara.net | Demi mendapatkan solar bersubsidi berbagai macam cara dan modus dilakukan oleh para mafia solar. Termasuk mengisi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang berada di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhsekti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Saat SPBN kedatangan solar, para nelayan langsung antri membeli dengan menggunakan jerigen berisikan 30 liter. Ironisnya, setelah beberapa jerigen terisi penuh tidak di bawa pulang tapi langsung di setorkan ke oknum Sekertaris Desa(Sekdes).

Salah satu Warga Desa Banyutowo, saat di konfirmasi mengatakan bahwa penimbunan solar bersubsidi tersebut diduga milik Wawan oknum Sekertaris.

“Kegiatan tersebut sudah dilakukan berbulan-bulan, tanpa ada pihak Kepolisian atau yang membidangi untuk melakukan penangkapan,” ungkapnya belum lama ini.

Ratusan jerigen isi 30 liter semua berisikan solar bersubsidi, dan tiga kempu berkapasitas seribu liter di tampung di rumah kosong di jadikan sebagai tempat penimbunan solar tersebut.

Saat awak media sidak di lokasi pada saat tengah malam, terdapat satu unit mobil tangki solar warna biru putih bernomor polisi H 9639 CQ bertuliskan PT MNE (Multi Niaga Energi) yang sedang beraktifitas mengisi solar.



Melihat kedatangan awak media ke lokasi pada tengah malam, para pekerja yang sedang beraktifitas menaikkan solar ke dalam mobil tangki langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat tersebut.

Sesuai aturan, penyalahgunaan BBM subsidi yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60 miliar, Senin (22/7/2024).

Editor : Rohman

Ops Patuh Candi, Satlantas Polresta Pati Anjangsana Datangi Keluarga Korban Laka

Pati – Cakranusantara.net | Satlantas Polresta Pati melaksanakan kegiatan Bakti Sosial kepada korban kecelakaan. Kanit Gakkum Satlantas Polresta Pati mendatangi kediaman korban laka di Desa Panjuran dan Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Kamis (18/07/2024).

Kegiatan ini Dalam rangka Operasi Patuh Candi 2024 dengan Tema “Polantas Sahabat Masyarakat”, dan Kegiatan ini diterima dengan baik oleh keluarga besar para korban laka lintas. Kanit Gakkum Satlantas Polresta Pati Ipda Moch Apri Hermawan berbincang langsung dengan keluarga korban laka lintas. Memberikan tali asih kepada keluarga korban.

“Pelaksanaan kegiatan Anjangsana dilaksanakan langsung ke rumah kediaman korban laka lintas berupa silaturahmi tatap muka dan



pemberian motivasi secara moral serta penyerahan bantuan sembako kepada korban laka lintas,” ucap Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Lantas Kompol Asfauri.

Kasat Lantas menegaskan kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dan bentuk dukungan moril Satlantas Polresta Pati kepada para korban laka lintas. Kasat Lantas juga berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut peduli keselamatan diri sendiri serta pengguna jalan lain.

“Kami juga berpesan kepada keluarga korban laka lintas betapa pentingnya keselamatan di jalan raya. Ingat ada keluarga kita yang menunggu di rumah jadi patuhi segala aturan dalam berlalu lintas,” pungkasnya. (Humas Resta Pati)

Kapolresta Pati Terima Penghargaan dari Kapolda Jateng



Pati – Cakranusantara.net | Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama menerima penghargaan dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Penghargaan diberikan dalam acara Gelar Operasional Semester I Tahun 2024 di Hotel Hyatt Regency, Yogyakarta, Jumat (19/07/2024).

Penghargaan diberikan oleh Kapolda Jateng atas prestasi sebagai Peringkat I Satwil penyelesaian perkara terbaik Polres/Polresta tingkat Polda Jateng. Atas penghargaan yang diterima, Kapolresta Pati mengatakan prestasi yang dicapai bukanlah prestasi pribadinya. Namun kerja keras seluruh personel Polresta Pati, terutama dalam kegiatan pengungkapan dan penyelesaian perkara. “Ini prestasi bersama. Akan kami pertahankan dan tingkatkan. Terimakasih kepada Bapak Kapolda, dan terimakasih untuk seluruh personel Polresta Pati,” ucap Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama.

Diketahui, dalam acara Gelar Operasional Semester I Tahun 2024 tersebut, dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Jateng dan para Kapolres, Kapolresta, dan Kapolrestabes jajaran Polda Jateng.

Dalam kesempatan itu Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi antara lain menegaskan komitmen Polda Jateng dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu fokus utama adalah Rencana Pergelaran Personil untuk Operasi Mantap Praja 2024, dengan total 220.470 personel yang akan dikerahkan. Dari jumlah tersebut, Polda Jateng akan menurunkan 24.185 personel, didukung oleh Kodam IV/Diponegoro dengan 10.044 personel, serta Linmas sebanyak 186.241 personel. “Ini adalah upaya kita untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga dengan baik,” ujar Irjen Pol Ahmad Luthfi. Selain itu, Polda Jateng telah melakukan berbagai persiapan pengamanan, termasuk pelatihan Pengawasan pribadi (Walpri), Pelatihan Sispam Kota dan Pelatihan Sispam Mako. “Ploting dengan benar pembagian personel pengamanan sesuai Tahapan Pilkada, jangan sampai dalam pergerakan Lambat, Implementasikan Polda Jateng hadir,” tegas Kapolda. (Humas)

Kapolres Kendal Mengunjungi Sejumlah Polsek Berikan Arahan Positif

Cakranusantara.net, Kendal | Dalam rangka meningkatkan kinerja dan soliditas jajarannya, Kapolres Kendal AKBP FERIA Kurniawan, S.I.K. melakukan kunjungan kerja ke Jajaran Polsek Pada hari Jumat, 02 Agustus 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mengecek langsung sarana dan prasarana Polsek serta memberikan arahan kepada Kapolsek Jajaran dan seluruh anggotanya.

Hadir dalam kegiatan ini Kabagren Polres Kendal Kompol Amin Supangat, S.H., M.M. Kasatlantas Polres Kendal AKP Agus

Pardiyo Marinos, S.H., M.H., Kasiwas Polres Kendal AKP Budijanton, S.H., Kasi Propam AKP Ruslan, S.H., M.M., Ps. KasiHumas Polres Kendal IPDA Deni Herawan dan Anggota masing-masing Polsek.

Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh anggota dalam menjalankan tugas. Beliau juga berpesan



agar anggota selalu menjaga kesehatan dan harmonisasi keluarga. Selain itu, Kapolres memberikan motivasi kepada anggota yang akan memasuki masa pensiun untuk mempersiapkan diri dengan membuka usaha. Kapolres berharap dengan kunjungan ini, kinerja Polsek di Jajaran dapat semakin meningkat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar dapat menjalankan tugas dengan optimal. “Kesiapsiagaan tidak hanya dalam hal peralatan, namun juga kesiapan fisik dan mental,” tegas Kapolres. Selain itu, Kapolres berpandangan bahwa keluarga yang harmonis akan memberikan ketenangan pikiran bagi anggota sehingga dapat berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugas. “Keluarga adalah benteng terakhir bagi seorang anggota. Jika keluarga harmonis, maka kinerja di lapangan juga akan lebih optimal,” ujar Kapolres. (Teguh)

Pelayanan Pengadilan Agama Kendal Lebih Dimaksimalkan



Cakranusantara.net, Kendal | Inovasi sebelumnya di Pengadilan Agama Kabupaten sudah ada, sekarang merevitalisasi dikemas lagi untuk dijalankan.

“Inovasi kedepan yang mau galakkan adalah revitalisasi MPP (Mall Pelayan Publik) kita dikasih stand oleh Pemerintah Daerah, kita yakinkan kepada masyarakat tentang keberadaan MPP, mungkin belum terlalu tersosialisasi,” ujar H. A. Farhat, Ketua Pengadilan Kendal. Kamis (1/8/2024) dikantornya.

Pelayanan selama ini ada dua hari di MPP, hari Selasa sama Kamis. Untuk sementara memang peminatnya masih kurang.

“Berharap bisa revitalisasi supaya ini betul-betul tersosialisasi, itu bisa menjadi bagian pelayanan kepada masyarakat,” terangnya. Lebih lanjut ia katakan, inovasi selanjutnya ramah difabel, layanan inklusif untuk kaum rentan. Yang difabel, punya kekurangan bisa terlayani secara maksimal.

“Kita prioritaskan pelayanannya melalui pelayanan inklusif, untuk kalangan difabel dan kaum rentan. Terus yang lainnya kita juga sediakan petis rambak yaitu untuk pengembalian produk, penyerahan produk, jadi masyarakat tidak perlu antri, mereka pesan secara online kita serahkan baik itu putusan atau akte cerai, tinggal diisi secara online dan kami tinggal serahkan. Karena itu bagian dari pelayanan,” katanya.

Selama ini Pengadilan Agama Kendal juga terus berinovasi, mencari hal-hal baru. Bagaimana masyarakat bisa terlayani secara baik, sebaik mungkin.

“Kondisi kantor kita buat nyaman mungkin, para pihak ini kan datang dengan permasalahan mereka, paling tidak dengan situasi kantor yang nyaman yang asri itu akan sedikit memberikan rasa nyaman buat mereka yang berperkara,” ungkapnya. Selain itu pihaknya menambahkan, pelayanan yang ada di MPP itu adalah terkait informasi-informasi mengenai Pengadilan Agama, dan saat ini lebih banyak kepada pelayanan penyerahan produk.

“Jadi produk-produk tersebut silahkan yang di arah kota sana, boleh ngambil produk di MPP. Dan MPP ini sebetulnya layanan secara keseluruhan, informasi pengadilan, pendaftaran, apapun terkait pengadilan yang bisa ditanyakan di MPP. Kita menyediakan itu untuk informasi-informasi layanan untuk masyarakat. (Teguh)

Gelar Pelatihan Gakkumdu ; Polda Jateng Tegaskan Kesiapan Hadapi Pilkada 2024

Cakranusantara.net, Karanganyar | Sebagai bentuk komitmen wujudkan pemilu aman dan lancar Polda Jateng gelar Pelatihan dan Rakor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada 2024 di The Alana Hotel Convention Center, Kab. Karanganyar pada Selasa (6/8/2024) pagi.

Kegiatan ini dipimpin oleh Waka Polda Jateng Brigjen Pol Agus Suryonugroho yang mewakili Kapolda Jateng Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo. Acara turut dihadiri sejumlah Pejabat Utama Polda Jateng, para Kapolres jajaran Solo Raya, serta para Kasat Reskrim dari 35 polres jajaran. Dalam sambutannya,

Waka Polda membacakan amanat Kapolda Jateng yang menyebut bahwa Pemilu adalah arena yang sah untuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan. Meski demikian, tanpa adanya pengawasan, perlindungan dan tindakan hukum tentu akan memunculkan suatu resistensi di tengah masyarakat.

“Sentra Gakkumdu ini sangat penting untuk mengawal proses demokrasi. ibarat wasit di tengah arena yang sah dalam upaya perebutan kekuasaan,” ujar Wakapolda.

Lebih lanjut, Wakapolda menambahkan bahwa pengalaman sebelumnya membuktikan Polda Jateng berhasil mengamankan proses Pemilu Pilpres 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan Polda Jateng dalam mengawal proses demokrasi.

“Pengalaman kita kemarin Polda Jateng telah berhasil mengamankan proses Pemilu Pilpres

2024. Ini membuktikan bahwa kita bisa mengawal proses demokrasi,” lanjutnya.

Dirinya menegaskan bahwa Polda Jateng berkomitmen menjaga Netralitas untuk mengawal jalannya pesta demokrasi pada gelaran Pilkada Serentak 2024 melalui sinergi dengan Bawaslu dan Kejaksaan baik di tingkat propinsi hingga kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

“Netralitas kita menjadi kunci suksesnya gelaran pesta demokrasi, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Wakapolda menekankan kepada seluruh peserta agar mempedomani SOP dalam pelaksanaan tugas sehingga bisa menyamakan persepsi dalam penerapan langkah-langkah taktis dan teknis di lapangan.

“Semoga kita bisa mengawal pemilu dengan baik dan menghasilkan proses demokrasi yang aman dan lancar. Prinsip penegakan hukum Sentra Gakkumdu dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan adalah kepastian pemanfaatan hukum secara cepat, sederhana, biaya murah dan tidak memihak siapapun,” tandasnya.

Sementara itu dalam keterangannya Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyatakan seluruh personil Polda Jateng

siap melaksanakan tugas dalam Pilkada Serentak 2024 secara Profesional. Kombes Pol Artanto, menambahkan, “Pelatihan ini merupakan bagian dari

upaya untuk memastikan bahwa seluruh personil Polda Jateng siap menghadapi tantangan dalam Pilkada Serentak 2024 secara Profesional, kami ingin setiap anggota memiliki pemahaman yang jelas dan mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta mampu berkoordinasi dengan baik dengan instansi terkait. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung,” Pungkasnya.

Pelatihan dan peningkatan kemampuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi terkait, sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan damai, serta menghasilkan pemilu yang berintegritas.



Commander Wish Kapolda Jateng, Polresta Pati Gelar Baksos Ke Warga Kurang Mampu



Cakranusantara.net, Pati | Dalam rangka Commander Wish Kapolda Jateng, Polresta Pati menggelar kegiatan bakti sosial ke Warga yang kurang mampu di Wilayah Kota Pati, Jumat (09/08/2024).

Dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama dan didampingi oleh Kapolsek Pati Iptu Heru Purnomo, Kanit Samapta Polsek, Kanit Binmas Polsek dan Bhabinkamtibmas.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama saat pimpin kegiatan tersebut menuturkan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini Sebagai bentuk kepedulian Polda Jateng kepada warga masyarakat dalam rangka Commander Wish Kapolda Jateng. “Kami dari Polresta Pati dan anggota memberikan bantuan kepada Perwakilan Warga Dhuafa di wilayah Kabupaten Pati sebagai bentuk wujud kepedulian kepada masyarakat”, ungkapnya.

Adapun bentuk Bantuan sosial yang diberikan dalam kegiatan tersebut yaitu berupa paket sembako dan uang tunai.

Joko subiyanto warga kelurahan Pati Kidul penerima bantuan sosial sangat berterima kasih kepada Kapolresta Pati dan Kapolda Jateng atas perhatiannya kepada warga. “Terima kasih pak Kapolresta dan Pak Kapolda Jateng, saya sangat senang atas perhatiannya kepada warga”, ucapnya. (Humas)

Kemenag Kendal Berikan Santunan Pada Anak Yatim

Cakranusantara.net, Kendal | Ribuan anak yatim piatu dapat santunan dari Kemenag Kabupaten Kendal. Lebih dari seribu anak yatim piatu mendapatkan santunan dari Kementerian Agama. Santunan tersebut dilaksanakan oleh Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Cabang Kendal Selasa (30-7-2024).

Kegiatan yang diberi nama lebaran yang dilaksanakan secara serentak se Indonesia pada tanggal 10 muharram 1446 hijriyah. Karena tempat dan waktu tidak memungkinkan maka diadakan sesi kedua.

Sekitar seratus lima puluh anak yatim dan piatu diajak bergembira. Mereka diajak bermain air di salah satu obyek wisata di Patean Kendal. Setelah bermain air anak-anak diajak makan bersama dan kemudian diberikan santunan. Ketua Ipari Cabang Kendal, Muhamad Taufik Rahman, kegiatan ini rutin dilakukan tiap tahun namun jumlah anak yatim selalu meningkat menyesuaikan anggaran dan donatur. Saat ini ada 150 anak yatim dan piatu diajak bermain dan makan siang kemudian diberikan santunan.

Santunan berupa uang sebesar enam ratus ribu rupiah, buku tulis, sarung laku laki dan perempuan. Penyerahan diserahkan oleh Kepala Kantor Kemenag para Kabid dan kepala KUA serta pengawas.

Menurut Muhamad Taufik Rahman anak



yatim dan piatu, yang sudah kehilangan orang tuanya dihibur agar bahagia seperti layaknya anak seusianya. Bahkan saat pemberian santunan tidak sedikit yang meneteskan air mata karena terharu.

Kepala Kemenag Kabupaten Kendal Mahrus mengatakan, lebaran yatim ini merupakan agenda tahunan, pada tanggal 10 muharram dilakukan santunan seribu anak yatim dan piatu, sedangkan hari ini diajak di obyek wisata bermain air kemudian diberikan santunan.

Mahrus menambahkan dengan kegiatan ini bisa menjalin hubungan baik antara kemenag dengan keluarga anak yatim piatu. Dan berbagi kebahagiaan bagi anak yatim piatu, bisa menikmati kebahagiaan sehari-hari, dan untuk keberlangsungan pendidikan mereka diberi santunan berupa uang, buku, dan sarung. (Teguh)

Ngawur Sewakan Lahan, Gapoktan Desa Karangsari Cluwak Ta Hadir di acara Mediasi

Cakranusantara.net, Pati | Polsek Cluwak berikan ruang mediasi problem carut-marut lahan pertanian di Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati. Ironisnya, lagi-lagi dari pihak Gapoktan tidak hadir dalam acara tersebut.

Secara langsung agenda tersebut dihadiri oleh Kapolsek Cluwak, Camat, Kepala Desa Karangsari, Danramil, Kasat Intel Polresta Pati, Ketua Komunitas Pemuda Peduli

Masyarakat Karangsari dan pihak pengambil alih saham PT RSA untuk duduk bersama upaya menemukan titik terang penyelesaian konflik pada lahan pertanian tidak ada yang dirugikan. Rumor yang beredar luas sebelum pihak Gapoktan, tanpa dasar yang jelas sengaja menyewakan lahan itu, justru pemegang mandat secara legal dari PT RSA sebagai pengelola justru nyaris disingkirkan haknya. Edi Cahyono, Pemegang kuasa pengelola secara legal (pihak PT RSA) menyampaikan, jika duduk permasalahan secara data otentik sampai timbul siapa yang dirugikan tak lain adalah masyarakat Desa Karangsari dan ia sendiri. Sementara, Kades Sukarna, Komisariss PT Tjandi Tunggal Wedari saat di wawancarai menyampaikan, ia datang karena dapat undangan dari Kapolsek untuk mediasi, sebab ada suatu permasalahan yang harus dibicarakan. “Upaya pertemuan pada hari ini kemungkinan besar bisa menemukan titik temu, utamanya adalah kesepahaman, memahami persoalan. Kemudian, ketika sama-sama paham tentu akan mengambil langkah, agar tidak ada yang merugikan,” ungkapnya. Masih lanjutnya, Kalau kemarin disini isunya PT RSA, tapi kalau sekarang sudah beralih milik PT Tjandi Tunggal Wedari sejak tahun 2022, dan untuk kontek hukumnya sudah sah karena dari dua PT sudah ketemu. “Memang PT RSA paska



adanya peralihan saham ke kami, tapi kayaknya memang masih guncang masalah pengurusan didalamnya. Sebenarnya, masalah dilapangan kami cuma mendengarkan saja, tapi untuk kontek kongkritnya baru hari ini,” ucapnya. Terkait plang atas nama PT RSA memang belum kami ganti, karena dalam salah satu kapasitas baru mendengar salah satu hal yang tentu akan kami pelajari semua, maka dalam waktu dekat mungkin akan kami persiapkan. Ditempat yang sama, Edi Cahyono, Ketua KPPMK menjelaskan, kalau pertemuan hari ini belum ada titik terang, yang jelas, kalau ada peralihan malah baru tahu, untuk pemegang saham yang sekarang Alhamdulillah baik, tapi kedepan belum tahu. “Saya kira hari ini belum ada keputusan, karena dari pihak Gapoktan tidak hadir, dan terkait HR juga belum ada kejelasan, tapi setidaknya sudah merespon,” jelasnya. Tejo



Hampir Tiga Bulan Belum Cair, Korban Lakalantas Rokan Hulu Keluhkan Pelayanan Jasa Raharja

Cakranusantara.net, Rokan Hulu | Sukenti (38), Warga Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau merupakan korban kecelakaan lalulintas (Lakalantas), pada Selasa (14/5/2024) yang lalu.

Akibat peristiwa tersebut, dirinya harus dirawat disalah satu rumah sakit di Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu karena mengalami luka luka cukup serius. Selanjutnya, suami korban Ridar Yanto mengajukan klaim asuransi Jasa Raharja, dengan melengkapi berbagai berkas ataupun dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim asuransi. Berdasarkan keterangan Ridar Yanto, pada saat itu D. Suliman selaku pihak Jasa Raharja menyampaikan, bahwa biaya pengobatan pasien di rumah sakit dijamin oleh pihak Jasa Raharja.

Kemudian, setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, saat mau keluar pihak keluarga pasien harus membayar sebesar Rp. 5 Juta sebagai Duit Panjer (DP) atau jaminan dari total biaya Rumah Sakit (RS) sekitar Rp 11 Juta. Saat kontrol pertama dan kedua, harus

membayar lagi sekitar Rp 800 ribu, serta biaya lainnya sekitar Rp 2 juta.

“Padahal pihak Jasa Raharja menyampaikan untuk biaya rumah sakit sudah dijamin. Namun faktanya, harus cari pinjaman kesana kemari untuk biaya DP atau jaminan di rumah sakit tersebut,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu (3/8/2024).

Namun hingga saat ini, lanjutnya, sudah dua bulan lebih sejak klaim diajukan belum juga ada kepastian dari pihak Jasa Raharja.

“Setiap saya hubungi, D. Suliman menyampaikan, bahwa masih menunggu pihak lawan yang menabrak istrinya, mengurus surat kendaraannya di Medan, Sumatera Utara karena saat kejadian sepeda motor yang digunakannya plat BK,” jelasnya.

Ridar Yanto juga mempertanyakan, apakah pengurusan klaim Jasa Raharja prosedurnya memang demikian? ” Masa urusan sepeda motor lawan kita yang dibebankan, seandainya sepeda motor lawan suratnya sebelah atau bodong, apa kita gak bisa klaim asuransi Jasa Raharja?,” ungkapnya dengan nada kecewa. Selanjutnya, awak media

[illegible]

menghubungi D. Suliman melalui pesan singkat WhatsApp guna konfirmasi terkait hal tersebut menyampaikan, bahwa RS baru menyerahkan berkasnya kemarin, dan masih ada beberapa biaya yang masih revisi belum selesai proses verifikasinya. “Untuk biaya pembayaran itu, kami berurusan dengan pihak RS tidak pasien. Pasien hanya sebatas kita jaminkan atau tidaknya. Kenapa masalah ini nanya ke saya, harusnya yang menanyakan ini pihak RS bukan bapak,” jawabnya singkat via WhatsApp, Sabtu (3/8/2024) sekitar pukul 15.24 WIB.

Perlu diketahui, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jasa Raharja tentunya memiliki standar aturan yang telah diatur oleh Pemerintah, seperti dalam POJK Nomor 69 Tahun 2016 pasal 40 bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan paling lama 30 hari. (*/ Tn)

Pj Bupati Pati Terima UHC Awards 2024

Cakranusantara.net, Pati | Komitmen Kabupaten Pati dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) mendapat pengakuan di tingkat nasional. Hal itu sejalan dengan penghargaan UHC Awards 2024 yang hari ini (8/8), diterima oleh Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di The Krakatau Grand Ballroom, Jl. Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1, Cipayang, Kota Jakarta Timur.

Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada sejumlah perwakilan kepala daerah. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dan Presiden International Social Security Association (ISSA) Mohamed Azman kepada seluruh Kepala Daerah yang telah memegang piala/award.

Saat diwawancarai usai penerimaan penghargaan, Henggar menjelaskan bahwa UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.

Di Indonesia, imbuah Pj Bupati, UHC ini diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Henggar pun lantas menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut.

Menurutnya, UHC Awards 2024 diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya melindungi masyarakat Pati melalui program JKN.

“Penghargaan UHC ini tentu akan menjadi motivasi bagi Pemkab untuk terus berinovasi dalam layanan kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat di masa depan,” ujarnya didampingi oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Pati Wahyu Giyanto.

Ia pun berharap dengan diterimanya penghargaan tersebut, penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Kabupaten Pati dapat semakin dirasakan

kemudahannya oleh semua lapisan masyarakat. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Pati Wahyu Giyanto, saat diwawancarai Tim Liputan Prokompim Setda Pati pun menyatakan rasa syukurnya.

“Dengan penghargaan UHC ini, diharapkan masyarakat tidak akan kesulitan lagi dalam mendapatkan layanan kesehatan, dan tentunya kemudahan akses menjadi tujuan kita bersama,” ujar Wahyu Giyanto.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Pati juga berharap penghargaan UHC ini bisa menjadi motivasi bagi Kabupaten Pati untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan,

serta memperkuat komitmen dalam memberikan akses kesehatan yang lebih baik dan merata bagi seluruh warga.

“Dengan keberhasilan ini, Kabupaten Pati telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan bukanlah sekadar impian, tetapi



sebuah kenyataan yang bisa diwujudkan”, imbuhnya.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin, dalam pidato penyerahan UHC Awards 2024, mengaku mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” ujarnya.

Namun, Wapres mengingatkan evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini. Terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” tuturnya.

Senada dengan Wapres, Menko Muhadjir Effendy yang juga berpidato dalam acara tersebut juga menyatakan bahwa capaian 98 persen UHC ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa bagi Indonesia.

“Kendati begitu, tidak ada artinya jika tidak menunjukkan seluruh rakyat Indonesia telah

mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam sambutannya melaporkan terkait kepesertaan JKN yang meningkat dari tahun ke tahun dengan capaian di atas 98 persen dari total penduduk.

Selain itu, sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota (96 kota dan 364 kabupaten) berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya, dengan cakupan kepesertaan semesta JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk.

“Sampai dengan 1 Agustus 2024, tercatat cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98% dari total penduduk yang semester 1 tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa,” paparnya.

Hadir dalam acara tersebut, Presiden International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir, segenap jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan para kepala daerah penerima penghargaan.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Pembangunan Suprayoga Hadi, Plt. Deputy Bidang Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, Masykuri Abdillah, Arif R. Marbun, dan Guntur Iman Nefianto. **

Henggar Dicopot Dari Jabatan PJ Bupati Pati Digantikan Sujarwanto Dwiattmoko

Cakranusantara.net, Pati | Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiattmoko, Sabtu (10/8/2024) resmi dilantik menjadi Penjabat Bupati Pati yang baru, menggantikan Henggar Budi Anggoro. Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Hadir pula dalam acara tersebut, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Forkopimda Pati, serta para pimpinan OPD di tingkat Provinsi maupun dari Kabupaten Pati. “Ini perintah dari Mendagri sehingga harus diserahkan hari ini, mengingat pejabat baru harus segera mengikuti pengarahannya presiden di IKN”, ungkap Nana Sudjana.

Sebagai Aparatur Sipil Negara, lanjut Pj Gubernur, maka kapan pun dibutuhkan memang harus selalu siap.

Ia pun lantas mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pj Bupati Pati periode 22 Agustus 2022 sampai 10 Agustus 2024.

“Pak Henggar beserta ibu sudah menjalankan tugas dengan baik. Saya dapat berkata seperti itu karena kami selama ini mengikuti, mengamati, dan menilai”, tambahnya.

Pj Gubernur pun berharap agar apa yang telah dicapai oleh Henggar dapat dipertahankan oleh penjabat yang baru.

“Dan selamat bertugas kepada Penjabat Bupati Pati yang baru. Pangkat jabatan adalah merupakan amanah Allah SWT dan kepercayaan dari pimpinan, karena nantinya semua harus dipertanggungjawabkan”, tutur Nana Sudjana. Lebih lanjut Pj Gubernur berpesan pada Sujarwanto untuk dapat menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat.

“Lakukan komunikasi aktif dengan Forkopimda karena itu adalah kunci dalam mengelola pelaksanaan tugas,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Nana Sudjana juga menyinggung soal kinerja Pemerintah Kabupaten Pati yang secara umum menunjukkan capaian yang baik utamanya dari segi perekonomian, yang pada tahun 2023 tumbuh positif di angka 5,02%, sedikit lebih tinggi dari Provinsi Jateng. “Tapi ini bagus karena masih di atas rata-rata”, tambahnya.

Kemudian angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pati pada tahun 2023 sebesar 4,29%, yang ternyata menurut Nana Sudjana lebih rendah dari provinsi, dimana Jateng berada di angka 5,13 %.

“Prevalensi stunting pada 2023 juga mengalami penurunan sebesar 18,5% (lebih rendah dari Jateng) namun belum mencapai target pemerintah pusat sebesar 14%. Ini akan jadi pekerjaan rumah untuk penjabat yang baru agar nantinya bisa mendekati ke angka 14%”, tutur Nana Sudjana.

Kemudian angka kemiskinan Kabupaten Pati pada bulan Maret 2024 sebesar 9,17%, disebut Pj Gubernur lebih rendah dari Jateng yang berada di angka 10,47.



“Yang masih menjadi perhatian adalah aspek kemiskinan ekstrim yang masih sebesar 1,23%, atau lebih tinggi dari Jateng. Kemudian inflasi Juli 2024 Year on Year (YoY) sebesar 2,06%, masih lebih tinggi dari Provinsi Jateng yang berada di angka 1,86%”, ungkap Nana Sudjana.

Pj Gubernur lantas berharap pada Pj Bupati Pati yang baru untuk segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalah di wilayahnya. Salah satunya yaitu dengan melakukan inovasi guna mewujudkan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat.

“Selain itu, jalin sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak termasuk dunia usaha untuk mengintervensi berbagai persoalan seperti kemiskinan ekstrim, stunting, serta pengangguran”, tambahnya.

Kemudian guna menghadapi cuaca yang tidak menentu, Nana Sudjana berpesan agar penjabat yang baru dapat melakukan mitigasi bencana.

“Dan jangan lupa optimalkan pengembangan sektor unggulan Kabupaten Pati, dengan meningkatkan sarana pendukung investasi bidang unggulan. Agar selain dapat menyerap tenaga kerja juga dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk mensejahterakan masyarakat”, tutur Pj Gubernur. Terkait agenda Pilkada di masing-masing Kabupaten/Kota, Nana Sudjana mengimbau agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

“Pemilu damai harus terus digelorakan dan disosialisasikan. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada seluruh warga Jateng karena pelaksanaan pemilu tahap pertama, berjalan dengan baik, partisipasi masyarakat cukup tinggi. Partisipasinya sebesar 82,6%, melebihi dari target yang diperkirakan yaitu 80%”, paparnya.

Memasuki masa pendaftaran Pilkada, Nana Sudjana meminta semua pihak untuk tetap waspada, dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Harapannya anak buah kita di lapangan mampu memetakan kerawanan yang akan terjadi, sehingga kita akan bisa mencegah dan mencari solusi”, imbuhnya. Di penghujung pidatonya ia pun berpesan agar Pj Bupati sering melakukan rapat koordinasi terkait Pilkada.

“Sering-seringlah melakukan koordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah agar pemilu berjalan dengan baik”, pungkasnya. **



Karnaval Budaya Wangi Pradesa, Tampilkan Keberagaman Budaya Tiap Kecamatan



Cakranusantara.net, Pati | Ikuti Karnaval Budaya Festival Wangi Pradesa, Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro ungkap rasa syukur Kabupaten Pati memiliki banyak budaya dan tradisi yang masih dilestarikan dan patut dijaga bersama.

Hal itu diungkapkan Henggar saat memberikan closing statement pada karnaval budaya jalur rempah festival Wangi Pradesa, Jumat (9/8/2024) malam.

Sebelumnya, peserta karnaval diberangkatkan oleh Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro yang didampingi jajaran Forkopimda Pati secara seremonial dengan memecahkan kendi.

Hal itu dimaknai sebagai pembuka pintu rejeki dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini peserta karnaval kirab budaya festival wangi pradesa dalam rangka hari jadi Kabupaten Pati ke 701, secara resmi kami berangkatkan. Semoga kedepan Kabupaten Pati semakin maju, utamanya dalam hal pelayanan kepada masyarakat” sebut Henggar sembari menjatuhkan kendi.

Seperti tahun sebelumnya, pada Karnaval Hari Jadi ke 701 Kabupaten Pati juga menampilkan sejumlah tradisi dan budaya yang dimiliki masyarakat Pati. Sebanyak 21 Kecamatan di Pati turut menampilkan tradisi dan budaya yang dimiliki. Antara lain tradisi meron dari Sukolilo, wayang topeng Soneyan dan lamporan dari Margoyoso, juga macan loreng dadi Kecamatan Gabus. “Karnaval budaya yang menampilkan keberagaman budaya dari 21 kecamatan ini merupakan sebuah bentuk kerjasama jalur rempah yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia” ungkap Henggar.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyemarakkan gelaran hari jadi ke 701 Kabupaten Pati, tahun 2024 ini.

Turut hadir dalam karnaval budaya tersebut Pj Bupati Pati, Sekda Pati, Forkopimda Pati serta Camat dan OPD jajaran Pemerintah Kabupaten Pati.

Direktur PPK Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek juga turut menyaksikan karnaval budaya ini.

Karnaval budaya yang dimulai pukul 19:00 WIB dengan titik keberangkatan di jalan P Sudirman (Gedung Juang) menuju ke Alun-alun Pati ini selesai pukul 21:30 WIB. *

Dua Kecamatan di Pati Menjadi Sasaran Bantuan Air Bersih Pak Polisi



Cakranusantara.net, Pati | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati salurkan bantuan air bersih di Dua Kecamatan yang mulai terdampak kekeringan, Jum'at (9/8/2024).

Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Asfauri melalui KBO Satlantas Polresta Pati menuturkan bahwa pihaknya kemarin telah menyalurkan bantuan air bersih pada Dua Desa yang terletak di Dua Kecamatan.

“Bantuan air bersih diberikan langsung kepada warga masyarakat yang benar-benar terdampak kekeringan di Desa Gebang Kecamatan Gabus dan Desa Tondokerto Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati,” tutur IPTU Muslimin.

Adapun Personel yang turut mengawal adalah Kasat, Wakasat, KBO, Kanit Turjawali, Kasubnit 1 Gakkum, para Kasubnit Reg Ident, serta sejumlah anggota Satlantas.

“Jumlah air bersih yang disalurkan sebanyak 30 ribu liter. Dalam pelaksanaan distribusi dibantu secara sinergi oleh para Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat,” tutup KBO Satlantas Polresta Pati. Rohman